

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI KOTA BALIKPAPAN

**(STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DP3AKB KOTA BALIKPAPAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SAFIRAH SYARAFINA

NIM. 175030101111064

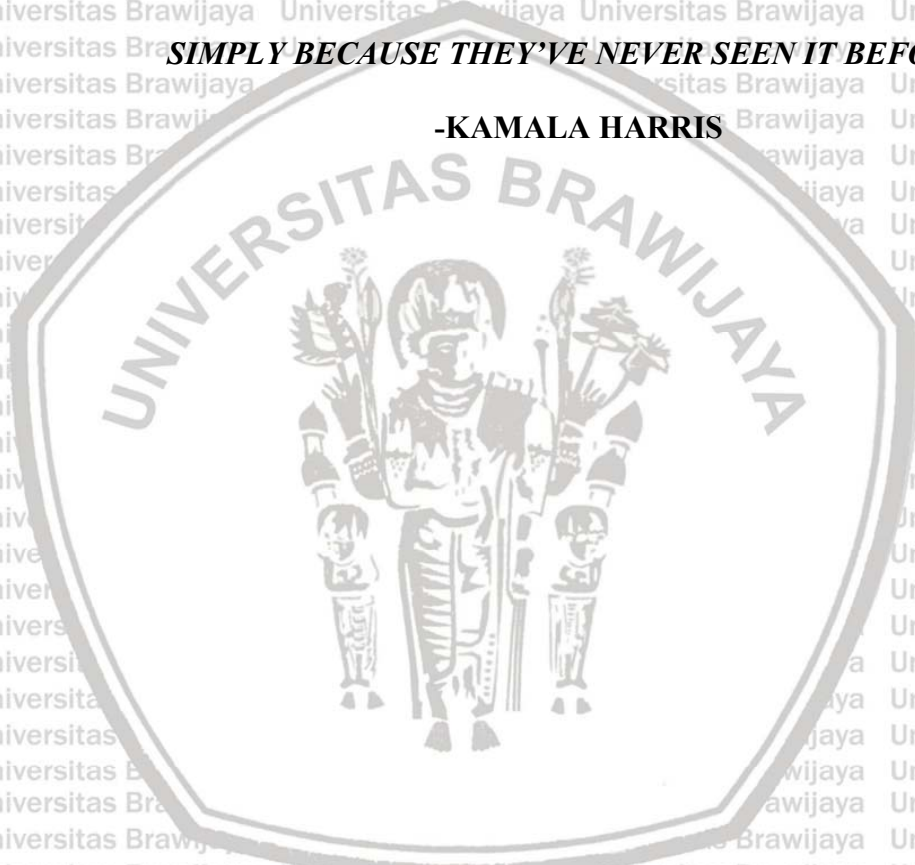


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2021**

MOTTO

***“SEE YOURSELF IN A WAY THAT OTHERS MIGHT NOT SEE YOU,
SIMPLY BECAUSE THEY’VE NEVER SEEN IT BEFORE”***

-KAMALA HARRIS



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah dalam Menangani Kekerasan pada Perempuan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Kota Balikpapan)

Disusun Oleh : Safirah Syarafina

NIM : 175030101111064

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Publik

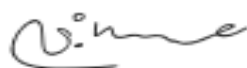
Konsentrasi/Minat. : -

Malang, 4 Juni 2021

KOMISI PEMBIMBING

Ketua

Anggota




Wike, S.Sos., M.Si, DPA
NIP. 197011262002122005

Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 198407132015041004

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Juni 2021

Jam : 08:30 WIB

Skripsi Atas Nama : Safirah Syarafina

Judul : Strategi Pemerintah dalam Menangani Kekerasan pada

Perempuan di Kota Balikpapan (Studi pada Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

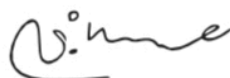
PPA) DP3AKB Kota Balikpapan)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing



Wike S. Sos., M.Si., DPA
NIP. 197011262002122005

Penguji I



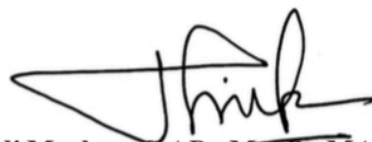
Dr. Drs. Siswidiyanto, MS.
NIP. 196007171986011002

Anggota Komisi Pembimbing



Nana Abdul Aziz S. AP., M.AP.
NIP. 198407132015041004

Penguji II



Ali Maskur S. AP., M.AP., MA.
NIP. 198607162014041001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah dalam Menangani Kekerasan pada Perempuan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Kota Balikpapan)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S- 1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 4 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Safirah Syarafina

NIM. 175030101111064

RINGKASAN

Safirah Syarafina, 2021, **Strategi Pemerintah Kota Balikpapan dalam Menangani Kekerasan pada Perempuan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Kota Balikpapan)** 1) Wike, S.Sos., M.Si, DPA 2) Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP hal vi

Ekspektasi masyarakat pada kualitas pelayanan publik akan semakin tinggi, namun negara memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, oleh karena itu negara membutuhkan strategi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk pelayanan negara yang wajib diberikan kepada warga negaranya adalah perlindungan agar setiap warga negara memiliki rasa aman untuk tinggal di negaranya, namun pada kenyataannya perempuan kerap mendapatkan kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginstruksikan agar setiap daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan di Kota Balikpapan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah Ketua UPTD PPA, anggota LBH SIKAP, Humas Aliansi GERAKS, dan salah seorang aktivis perempuan.

Pada tahun 2019 tercatat 27 perempuan di Kota Balikpapan yang menjadi korban kekerasan, sedangkan pada tahun 2020 tercatat 9 perempuan, dan pada tahun 2021 (pertanggal 31 Maret) terdapat 5 perempuan yang menjadi korban kekerasan. Data tersebut adalah data yang tercatat pada UPTD PPA dan tidak menggambarkan jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang sesungguhnya, mengingat ada banyak kasus kekerasan khususnya yang dialami oleh perempuan namun tidak di laporkan. Hal tersebut dapat menjadi pertanda buruk jika jumlah kasus meningkat namun tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Strategi yang digunakan oleh UPTD PPA adalah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi yang juga bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

KATA KUNCI: STRATEGI, MENANGANI, KEKERASAN PEREMPUAN

SUMMARY

Safirah Syarafina, 2021, **Strategi Pemerintah Kota Balikpapan dalam Menangani Kekerasan pada Perempuan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Kota Balikpapan)** 1) Wike, S.Sos., M.Si, DPA 2) Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP hal vii

Public expectations on the quality of public services will be increase, but the state has limited ability to fulfill the needs of its people, therefore the state needs a strategy to providing public services to its people. One form of state service that must be provided to its citizens is protection so that every citizen has a sense of security to live in their own country, but in reality women often get violence. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection has instructed each region to form a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). UPTD PPA has an important role in handling cases of violence in Balikpapan City.

In this research, researchers used a qualitative research model. Qualitative research is research related to a person's life, stories, behavior, and also about the function of organizations, social movements or interrelationships. The method of data collection in this research is by interview and documentation. Sources of data in this study were the Head of UPTD PPA, members of LBH SIKAP, Public Relations of the GERAKS Alliance, and one of the women activists.

In 2019 there were 27 women in Balikpapan City who became victims of violence, while in 2020 there were 9 women, and in 2021 (31 March) there were 5 women who became victims of violence. The data is recorded by UPTD PPA and does not describe the actual number of cases of violence against women, considering that there are many cases of violence, especially those experienced by women but not reported. This can be a bad sign if the number of cases increases but is not accompanied by an increase in public awareness to report acts of violence. The strategy used by UPTD PPA is coordinating with institutions and organizations that are also engaged in the protection of women and children.

KEYWORD: STRATEGY, HANDLE, WOMEN VIOLENCE

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan pengetahuan dan keluasan berfikir sehingga kita dapat mempelajari semua ilmu-Nya. Dengan rahmat dan karunia-Nya pula, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Strategi Pemerintah dalam Menangani Kekerasan pada Perempuan di Kota Balikpapan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Kota Balikpapan)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Wike, S.Sos., M.Si, DPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta UPTD PPA Kota Balikpapan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di UPTD PPA Kota Balikpapan.
6. Papah, Bunda, dan keluarga tercinta.
7. Seluruh keluarga besar Administratio Choir.

8. Teman-teman yang sudah seperti saudara bagi saya yang terdiri dari Adisti, Yolan, Chintya, Tia, Ria, Shania, Emir, Ayu, Azizah, Shabila, Shendi, Hafizh, Puspa, dan Fandy.

Penulis menyadari bahwa mungkin Skripsi ini tidak sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dalam. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai sumber pengetahuan baru maupun landasan penulisan selanjutnya.

Balikpapan, 18 November 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	9
I.3 Tujuan Penelitian.....	9
I.4 Kontribusi Penelitian.....	10
I.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
II.1 Administrasi Pembangunan.....	13
II.1.1 Pengertian Administrasi Pembangunan.....	13
II.1.2 Ciri-ciri Administrasi Pembangunan.....	16
II.1.3 Asal Usul Konsep Administrasi Pembangunan	17
II.2 Manajemen Strategi di Organisasi Publik.....	19
II.2.1 Strategi.....	19
II.2.2 Manajemen Strategi.....	24
II.2.3 Manajemen Strategi di Sektor Publik	25
II.3 Kekerasan Terhadap Perempuan	26
II.3.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan.....	26
II.3.2 Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan	27
II.3.3 Jenis-jenis Kekerasan.....	29
II.3.4 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
III.1 Jenis Penelitian	34
III.2 Fokus Penelitian	35
III.3 Lokasi Penelitian	36
III.4 Sumber Data.....	37
III.5 Jenis Data	38

III.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
III.7 Instrumen Penelitian.....	40
III.8 Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
IV.1.1 Gambaran Umum Kota Balikpapan.....	46
IV.1.2 Gambaran Umum DP3AKB Kota Balikpapan.....	56
IV.1.3 Gambaran Umum UPTD PPA Kota Balikpapan.....	64
IV.2 Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Balikpapan.....	75
IV.3 Strategi dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Balikpapan.....	89
BAB V PENUTUP.....	104
V.1 Kesimpulan.....	104
V.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kasus dan klien UPTD PPA

DP3AKB Kota Balikpapan dari tahun 2019-2021 5

Tabel 1.2 Kasus kekerasan pada perempuan

dewasa mulai dari tahun 2019-2021 6

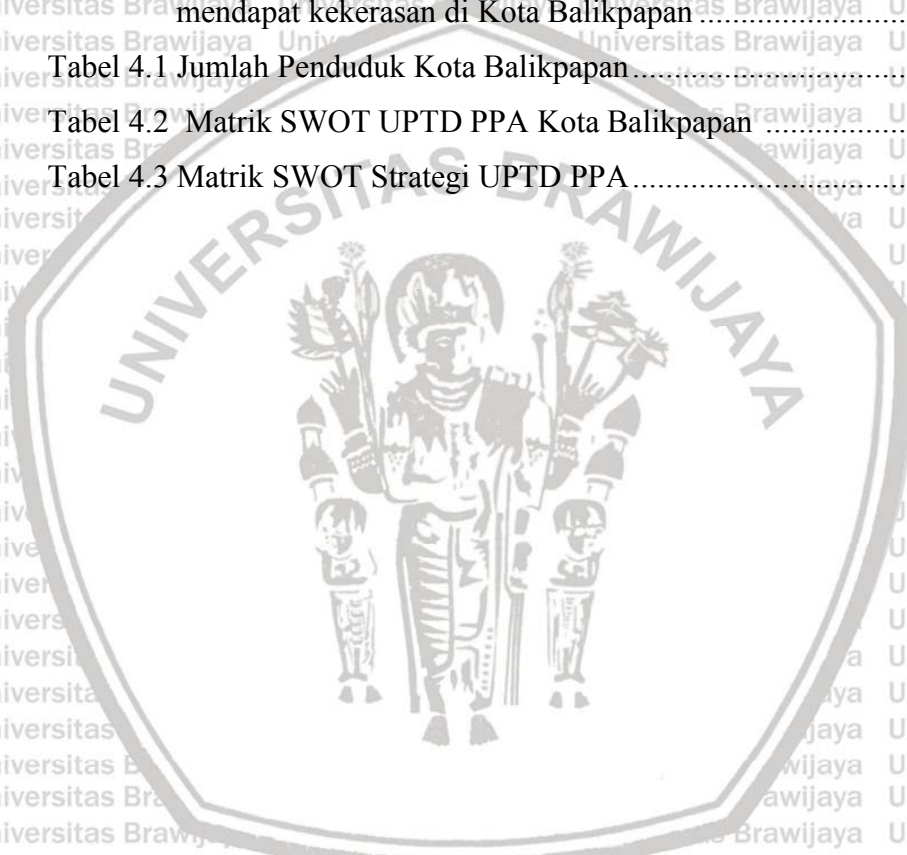
Tabel 1.3 Status klien (perempuan dewasa) yang

mendapat kekerasan di Kota Balikpapan 7

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan 54

Tabel 4.2 Matrik SWOT UPTD PPA Kota Balikpapan 96

Tabel 4.3 Matrik SWOT Strategi UPTD PPA 101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan.....	36
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Balikpapan.....	49
Gambar 4.2 Stuktur Organisasi DP3AKB Kota Balikpapan.....	60
Gambar 4.3 Tampak Depan UPTD PPA Kota Balikpapan.....	67
Gambar 4.4 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Balikpapan ...	69
Gambar 4.5 Alur Penanganan Kasus Kekerasan di UPTD PPA...	80
Gambar 4.6 Pola Pikir Analisis Swot.....	92



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah kasus dan klien di UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan dari tahun 2019-2021	81
Grafik 4.2 Jenis Kasus kekerasan pada perempuan dewasa mulai dari tahun 2019-2021	82
Grafik 4.3 Jumlah Kasus kekerasan pada perempuan dewasa yang ditangani LBH SIKAP dari Tahun 2019-2021	84
Grafik 4.4 Status klien (perempuan dewasa) yang mendapat kekerasan di Kota Balikpapan pada Tahun 2019	86
Grafik 4.5 Status klien (perempuan dewasa) yang mendapat kekerasan di Kota Balikpapan pada Tahun 2020	87



DAFTAR DIAGRAM

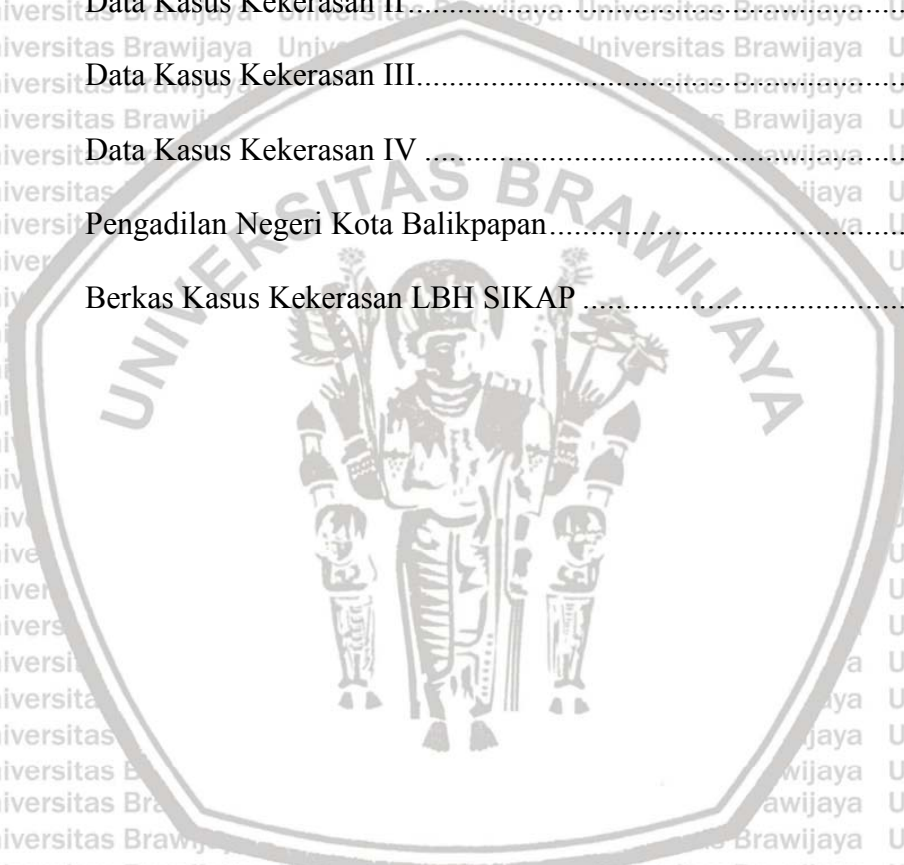
Diagram 4.1 Agama di Kota Balikpapan.....	55
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara I	110
Transkrip Wawancara II	117
Transkrip Wawancara III	120
Transkrip Wawancara IV	122
Transkrip Wawancara V	122
Transkrip Wawancara VI	123
Transkrip Wawancara VII	126
Bersama Kepala UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan	129
Pemantaun Klien yang Kasusnya Telah Selesai Oleh UPTD	129
Tahap Asesmen	130
Bantuan Hukum Oleh UPTD PPA	130
Bantuan Rehabilitasi Sosial	131
Proses Mediasi	131
UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan Menerima	
Penghargaan sebagai UPTD PPA Terbaik Ke-3 Tingkat	
Kabupaten Kota Seindonesia	132
Penandatangan Prasasti UPTD PPA DP3AKB	
Kota Balikpapan	132
Prasasti UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan	133
Pintu Masuk Utama UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan	133
Mobil Dinas UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan	134
Tampak Depan UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan	134

Struktur Organisasi di UPTD PPA	135
Spanduk Informasi Mengenai UPTD PPA	135
Spanduk Informasi Alur Pelayanan di UPTD PPA	136
Halaman Parkir UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan	136
Data Kasus Kekerasan I	137
Data Kasus Kekerasan II	137
Data Kasus Kekerasan III	138
Data Kasus Kekerasan IV	138
Pengadilan Negeri Kota Balikpapan	139
Berkas Kasus Kekerasan LBH SIKAP	140



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin hari akan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Ekspektasi masyarakat pada kualitas pelayanan publik akan semakin tinggi, namun negara memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, oleh karena itu negara membutuhkan strategi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Menurut Sjafrizal (Abdussamad dan Amala, 2016: 265) startegi adalah cara atau alat untuk mencapai tujuan secara lebih baik dan cepat. Salah satu bentuk pelayanan negara yang wajib diberikan kepada warga negaranya adalah perlindungan agar setiap warga negara memiliki rasa aman untuk tinggal di negaranya. Pemerintah Indonesia sebagai pelayan publik memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Menurut Kurniawan (2016: 571) pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) juga menyatakan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negara yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”. Memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban pemerintah, namun sekaligus memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama, namun pada implementasinya perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga atau yang kerap disebut dengan KDRT tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Tujuan PKDRT tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 yaitu sebagai berikut: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (2)

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kekerasan terhadap manusia khususnya perempuan kerap terjadi di tengah masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena masih adanya pandangan bahwa perempuan adah makhluk yang lemah bahkan kedudukannya berada di bawah laki-laki. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya melapor saat mendapatkan kekerasan maupun saat menyaksikan kekerasan masih tergolong rendah. Pada kenyataannya tidak banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan memiliki keberanian untuk melapor begitupun dengan pihak yang menyaksikan ditambah lagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pemerintah berusaha agar kekerasan terhadap perempuan dapat ditangani dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak jangka panjang yang bisa saja timbul. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban seperti trauma, menjauhkan diri dari aktivitas sosial, bahkan memiliki perasaan tidak berharga sehingga ingin mengakhiri hidup, oleh karena itu korban membutuhkan bantuan tidak hanya dari pemerintah namun juga dari masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 mengeluarkan regulasi dimana daerah-daerah dapat

membentuk UPTD PPA. UPTD PPA memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mendapat kekerasan.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak kekerasan.

Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, UPTD tersebut bernama UPTD PPA DP3AKB yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan. UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan adalah bentuk implementasi dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1, UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menghadapi kasus kekerasan. Kekerasan di Kota Balikpapan terjadi di dalam lingkup rumah tangga maupun di luar lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada 14 April 2021 mengenai kasus kekerasan baik yang diterima olah anak laki-laki, anak perempuan, dan perempuan dewasa yang tercatat di UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Proses	Jumlah Kasus Selesai	Jumlah Klien Proses	Jumlah Klien Selesai
1	2019	78	0	78	75	0
2	2020	52	0	52	45	0
3	2021 (per 31 Maret)	24	24	0	18	0
	Jumlah	154	24	130	138	120

Tabel 1.1 Jumlah kasus dan klien UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan dari tahun 2019-2021

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 154 kasus kekerasan dengan status 24 kasus yang masih dalam proses dan 130 kasus yang telah selesai diproses, selain itu juga terdapat 138 klien dengan status 18 klien yang masih dalam proses dan 120 klien yang telah selesai diproses. Klien dapat mengalami beberapa kasus sekaligus sehingga dapat dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah kasus selalu lebih tinggi dari jumlah klien. Pada tahun 2019 terdapat 78 kasus dengan status 0 kasus proses dan 78 kasus selesai, lalu terdapat 75 klien dengan status 0 klien proses dan 75 klien selesai. Pada tahun 2020 terdapat 52 kasus dengan status 0 kasus proses dan 52 kasus selesai, lalu terdapat 45 klien

dengan status 0 klien proses dan 45 klien selesai. Pada tahun 2021 (per tanggal 31 Maret) terdapat 24 kasus dengan status 24 kasus proses dan 0 kasus selesai, selain itu terdapat 18 klien dengan status 18 klien proses dan 0 klien selesai. Jenis kekerasan yang terjadi pun beragam seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Jumlah kasus dan jumlah klien yang tertera pada tabel diatas adalah kasus dan klien yang dilaporkan dan dicatat di UPTD PPA Kota Balikpapan, sehingga tabel diatas tidak mencerminkan jumlah kasus kekerasan di Kota Balikpapan secara riil.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada tanggal 14 April 2021 mengenai kasus kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan, terdapat beberapa kasus kekerasan yang terjadi di kota Balikpapan khususnya dialami oleh perempuan.

No.	Jenis Kasus	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Kekerasan Fisik	14	7	1
2.	Kekerasan Psikis	0	1	2
3.	Kekerasan Seksual	13	0	3
4.	Eksplotasi Ekonomi	0	0	0
5.	Eksplotasi Seksual	0	0	0
6.	Perdagangan Orang	0	0	0
7.	Penelantaran	0	0	0
8.	Lain-lain	3	2	0
	Jumlah	30	10	6

Tabel 1.2 Kasus kekerasan pada perempuan dewasa mulai dari tahun 2019-2021

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Pada tahun 2019 terdapat 30 kasus dengan rincian 14 kasus kekerasan fisik, 13 kasus kekerasan seksual, dan 3 kasus lain-lain yang dialami oleh perempuan dewasa di Kota Balikpapan. Pada tahun 2020 terdapat 10 kasus dengan rincian 7 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 2 kasus lain-lain yang dialami oleh perempuan dewasa di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2021 (per 31 Maret) terdapat 1 kasus kekerasan fisik, 2 kasus kekerasan psikis, dan 3 kasus kekerasan fisik.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada tanggal 14 April 2021 mengenai kasus kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan, kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 dan 2020 telah selesai ditangani.

Bulan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021 (per 31 Maret)		
	Jumlah Korban	Proses	Selesai	Jumlah Korban	Proses	Selesai	Jumlah Korban	Proses	Selesai
Jan-Maret	8	-	8	6	-	6	5	5	-
April-Juni	6	-	6	1	-	1			
Juli-September	6	-	6	1	-	1			
Oktober-Desember	7	-	7	1	-	1			
JUMLAH	27		27	9		9	5	5	-

Tabel 1.3 Status klien (perempuan dewasa) yang mendapat kekerasan di Kota Balikpapan

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Pada tahun 2019 terdapat 27 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan di Kota Balikpapan, lalu pada tahun 2020 terdapat 9 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan, dan pada tahun 2021 (per 31 Maret) terdapat 5 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan di Kota Balikpapan. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan pada tahun 2019 sejumlah 30 kasus, namun pada Tabel 1.3 jumlah korban pada tahun 2019 sejumlah 27 korban, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa satu orang perempuan dewasa dapat mengalami beberapa kasus kekerasan. Kasus kekerasan sangat beragam, maka kasus kekerasan yang terjadi selain dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, perdagangan orang, maupun penelantaran makan akan dimasukkan ke dalam jenis kasus lain-lain. Salah satu contoh dari kasus lain-lain seperti *bullying* dan sebagainya. Jumlah kasus yang tercatat pada UPTD PPA tersebut tidak menggambarkan jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang sesungguhnya, mengingat ada banyak kasus kekerasan khususnya yang dialami oleh perempuan namun tidak di laporkan, fenomena ini diibaratkan seperti gunung es. Pada bulan Oktober 2020, UPTD PPA mengeluarkan aplikasi LAPOR PAK yang dapat diunduh di *Google Play*. LAPOR PAK adalah aplikasi berbasis android yang dapat digunakan untuk melaporkan kasus kekerasan pada perempuan baik yang dialami maupun disaksikan.

Strategi yang digunakan oleh UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan adalah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Hal

tersebut dilakukan mengingat UPTD PPA di Kota Balikpapan baru saja didirikan pada tahun 2019, sehingga masih kurang berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan yang sangat beragam jenisnya. Strategi tersebut dirasa kurang untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi karena terdapat penurunan jumlah kasus yang diindikasikan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan yang dilaporkan pada UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan selama ini ?
2. Apa saja strategi UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan dalam menangani kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitiannya ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis penanganan kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan yang dilaporkan pada UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan selama ini.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan dalam menangani kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan.

I.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti ini dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai strategi DP3AKB khususnya UPTD PPA Kota Balikpapan dalam menangani kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan menjadikan penulis sebagai aktor yang dapat mengedukasi orang-orang di sekitar penulis mengenai kekerasan perempuan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kota Balikpapan, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan yang mendapatkan kekerasan maupun yang menyaksikan kekerasan untuk melapor.

c. Bagi Pemerintah Kota Balikpapan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pertimbangan untuk menentukan upaya terkait dengan penanganan kekerasan perempuan di Kota Balikpapan.

1.5 Sistemika Pembahasan

Penulis menyajikan sistemika pembahasan pada penelitian ini agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Sistemika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistemika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Administrasi Pembangunan, Manajemen Strategi di Sektor Publik, dan Kekerasan terhadap Perempuan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai metode penulisan yang akan penulis gunakan pada penelitian ini.

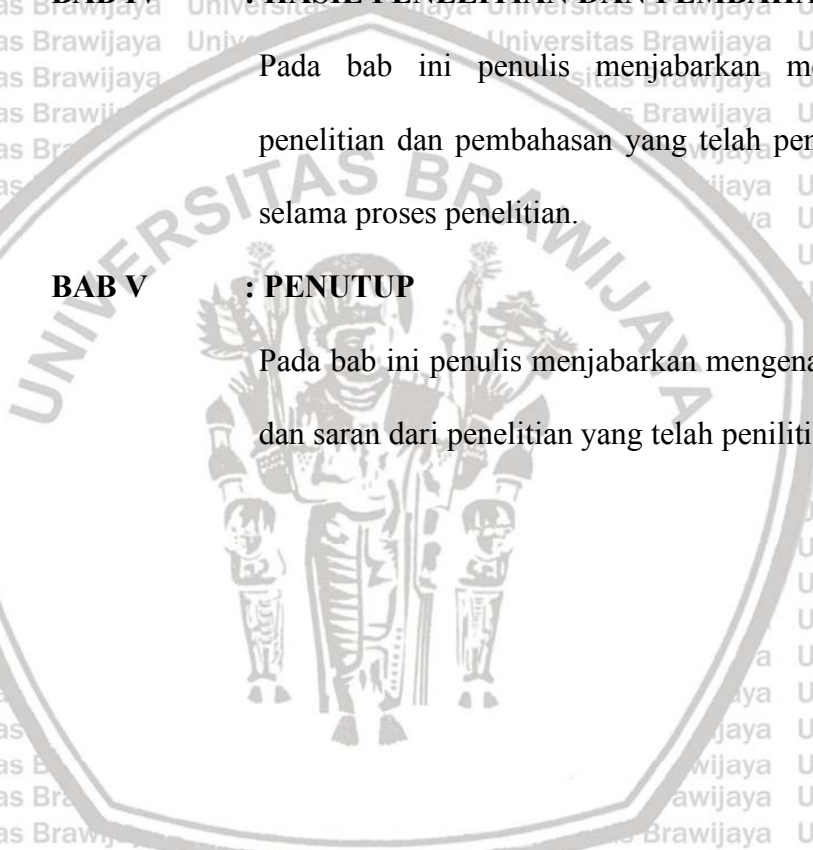
Pada bab ini terdapat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti dapatkan selama proses penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Administrasi Pembangunan

II.1.1 Pengertian Administrasi Pembangunan

Menurut Soewarno Handyaningrat (Anggara & Sumantri, 2016:

15) Administrasi dalam arti sempit berasal dari bahasa Belanda yaitu *administratie* yang berarti segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, kearsipan, dan keanggotaan. Administrasi juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *ad* yang berarti pada dan *ministrare* yang berarti melayani, sehingga administrasi berarti memberikan layanan (Anggara & Sumantri, 2016: 14-15). Menurut The Liang Gie (Anggara & Sumantri, 2016: 15) secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sondang P. Siagian (Anggara & Sumantri, 2016: 16) menjelaskan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan perubahan maupun pertumbuhan secara terencana dan secara sadar yang dilakukan oleh suatu negara demi menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*), sehingga terdapat tujuh ide pokok yaitu sebagai berikut (Siagina, 2017, 4):

1. Pembangunan adalah suatu proses;
2. Pembangunan adalah upaya secara sadar yang ditetapkan sebagai sesuatu yang dilaksanakan;
3. Pembangunan adalah sesuatu yang dilakukan secara terencana, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;
4. Rencana pembangunan memiliki makna perubahan dan pertumbuhan;
5. Pembangunan mengarah pada modernitas;
6. Modernitas yang ingin dicapai mencakup semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, serta bidang pertahanan serta keamanan;
7. Semua hal yang telah disebutkan diatas adalah usaha pembinaan bangsa sehingga negara tersebut memiliki fondasi yang kokoh dan menjadikan negara tersebut sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Menurut Sondang P. Siagian (Anggara & Sumantri, 2016: 24) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut

Mustopadidjaja (Anggara & Sumantri, 2016: 24) administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Menurut J.B. Kristadi (1998) administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mapu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan. Administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah pengambilan kebijakan yang bersifat umum, penentuan perencanaan, melakukan aktivitas substansial, menjaga keseimbangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, melakukan pemberdayaan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta melakukan proses pengembangan kapasitas, baik bagi aparatur maupun bagi masyarakat (Nana Abdul Aziz, 2019: 14). Bintoro Tjokrohamidjojo (Anggara & Sumantri, 2016: 25) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi administrasi pembangunan yaitu yang pertama adalah penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana-sarana administrasi, dan yang kedua adalah penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan program-program pembangunan, serta pelaksanaannya secara efektif. Administrasi pembangunan merupakan pendekatan ilmu yang dinamis dan mengikuti perubahan dinamika ruang dan waktu (Nana Abdul Aziz, 2019: 10).

Menurut Aziz (2019) fokus dari administrasi pembangunan disesuaikan dengan tantangan ekologis negara-negara di dunia, dan lokus dari administrasi pembangunan mayoritas ditujukan untuk negara-negara dunia ketiga.

II.1.2 Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Sondang P. Siagian (Anggara & Sumantri, 2016: 26-27)

merumuskan ciri-ciri dari administrasi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif, bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya dalam proses politik;
2. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent* yaitu merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan;

3. Administrator dalam aparaturnya pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan;
4. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara berkembang;
5. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi masa depan;
6. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain;
7. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur tersebut disebut dengan *mission driven*.

II.1.3 Asal Usul Konsep Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2017), setelah Perang Dunia II berakhir, timbul pola baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pola pertama, terdapat negara-negara pemenang dan terdapat negara-negara yang kalah.

Salah satu dampak buruk dari suatu peperangan adalah kehidupan perekonomian yang hancur yang lebih dirasakan oleh negara-negara yang kalah peran dibandingkan dengan negara-negara yang menang perang,

namun dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan ekonomi, dan pertimbangan politik, maka negara-negara pemenang perang membantu negara-negara yang kalah dalam peperangan.

Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah Amerika Serikat membantu membantu negara-negara di Eropa Barat dan juga Jepang.

Program bantuan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara di Eropa Barat dikenal dengan istilah "*Marshall Plan*" yang dipelopori oleh Jendral Marshall yang kala itu menjabat sebagai Menteri

Luar Negeri Amerika Serikat. Program bantuan tersebut memberikan dampak yang positif. Hal tersebut berhubungan dengan perkembangan

Administrasi Pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu baru. Para Ilmuwan Amerika Serikat khususnya mereka yang tergabung dalam

"*Comparative Administration Group*" menjadi pelopor perkembangan

disiplin ilmu Administrasi Pembangunan. Pola kedua, timbul hubungan

antarnegara yaitu antara negara-negara bekas penjajah dan negara-negara

baru yang merupakan bekas negara jajahan yang telah memperoleh

kemerdekaan. Sebagian besar negara-negara baru yang timbul usai Perang

Dunia II terletak di Benua Asia dan Benua Afrika. Semua negara tersebut

memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Negara-negara yang

dulunya penjajah yang telah menjadi negara maju dan negara kaya

meninggalkan negara bekas jajahannya dalam keadaan miskin dan

terbelakang dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang

ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, dan bidang lainnya. Hubungan

antarnegara yang dapat terlihat jelas adalah negara bekas penjajah ingin menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara bekas jajahannya.

Pemberian bantuan dalam berbagai bentuk kepada negara-negara yang sedang berkembang merupakan suatu fenomena yang mendorong pesatnya perkembangan ilmu administrasi pembangunan.

II.2 Manajemen Strategi di Organisasi Publik

II.2.1 Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang memiliki arti komandan militer (Devi Yulianti, 2018: 3). Strategi tidak lagi hanya digunakan pada dunia militer maupun olahraga, namun sektor publik maupun privat juga menggunakan strategi. Tujuan strategi pada bidang militer maupun pada organisasi publik memiliki kesamaan yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa orang menganggap bahwa strategi sama dengan taktik, namun sesungguhnya berbeda. Strategi merupakan sesuatu yang dapat mengikuti perubahan sehingga strategi memiliki pilihan alternatif, dalam kata lain strategi bersifat dinamis, berbeda dengan taktik yang hanya dilakukan pada suatu waktu dan suatu keadaan tertentu (Devi Yulianti:2018: 3). Menurut Sjafrizal (Abdussamad dan Amala, 2016: 265) strategi adalah cara atau alat untuk mencapai tujuan secara

lebih baik dan cepat. Menurut Porter (Yulianti, 2018: 3) strategi adalah penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Menurut Arnoldo C. Hax dan Nicholas S. Manjuluk (Chaniago, 2014: 89) strategi adalah cara menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggungjawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategik dan operasional pada seluruh tingkat hirarki, dan melewati seluruh lapisan. Menurut Harmel dan Prahalad (Abdussamad dan Amala, 2016: 265) strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan. Menurut Allison (Abdussamad dan Amala, 2016: 266) strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, selain itu strategi juga merupakan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Menurut Siagian (Kasmira, 2020: 7) strategi adalah suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Bintoro (Kasmira, 2020: 8) strategi adalah keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan pasti, guna mencapai tujuan untuk mengatasi permasalahan, dimana di dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Menurut Kuncoro (Kasmira, 2020: 8) strategi adalah bagian dari proses yang mencakup sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan

berurutan sehingga membuat strategi yang telah dibentuk dapat memenuhi tujuan dari organisasi. Berdasarkan beberapa definisi strategi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara suatu organisasi mencapai tujuan yang dalam prosesnya senantiasa selalu ada peningkatan.

Strategi memiliki beberapa tahap. Menurut Haryadi (Kasmira, 2020: 9) tahapan strategi terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan

Perumusan merupakan tahap pertama dalam strategi. Pada tahap perumusan strategi meliputi analisis lingkungan internal maupun eksternal seperti penetapan visi dan misi, perencanaan, dan tujuan strategi. Perumusan dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan.

Menurut Mahmudi (Abdussamad dan Amala, 2016: 266) perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral, dan spiritual.

Menurut Wahyudi (Kumara, 2018: 67) dalam proses ini adalah bagaimana menghubungkan organisasi dengan lingkungannya dan menciptakan strategi yang cocok untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Bryson (Mobalen 2013: 8) bahwa organisasi sektor publik menekankan pentingnya proses perumusan strategi yang terdiri dari delapan langkah yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian awal tentang pembuatan keputusan;
- b) Identifikasi mandat yang dihadapi organisasi pemerintah;
- c) Klarifikasi misi dan nilai organisasi;

- d) Identifikasi peluang eksternal dan ancaman yang dihadapi organisasi;
- e) Identifikasi kekuatan internal dan kelemahan organisasi;
- f) Identifikasi isu strategis;
- g) Pengembangan strategi;
- h) Gambaran organisasi di masa mendatang.

2. Pelaksanaan

Strategi tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa adanya pelaksanaan. Perencanaan strategi adalah langkah awal yang penting, tidak sedikit organisasi yang menghabiskan banyak sumber daya yang dimiliki dalam proses perumusan atau perencanaan strategi, oleh karena itu tahap setelah perumusan yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan strategi meliputi pembangunan struktur, pembangunan program, budget, dan pelaksanaan. Pelaksanaan strategi adalah suatu proses yang krusial karena saat dilaksanakan maka akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang tidak diprediksi sebelumnya. Menurut David (2010) (dalam Kumara, 2018: 67) perubahan berlangsung melalui implementasi dan evaluasi, bukan melalui rencana. Menurut Anderson (Kahar, 2010: 13) terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam proses implementasi yaitu sebagai berikut:

- a) Siapa yang dilibatkan dalam implementasi;
- b) Hakikat proses administrasi;
- c) Kepatuhan atas suatu kebijakan;

d) Efek atau dampak dari implementasi.

Menurut Thomas V. Bonoma (Yulianti, 2018: 60) terdapat empat kemungkinan yang terjadi baik pada saat perumusan dan pelaksanaan strategi yaitu *succes*, *trouble*, *roulette*, dan *failure*. *Succes* adalah dimana strategi mencapai hasil yang diharapkan. *Trouble* adalah dimana perumusan strategi dilakukan dengan baik, namun pelaksanaannya buruk. *Roulette* adalah dimana perumusan strategi tidak terlalu baik, namun pelaksanaannya baik. *Failure* adalah dimana baik perumusan strategi dan pelaksanaannya sama-sama tidak baik.

Perumusan strategi dan pelaksanaan atau implementasi strategi memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya dijelaskan oleh Fred R. David (Yulianti, 2018: 61) sebagai berikut:

1. Perumusan strategi fokus pada efektivitas sedangkan implementasi strategi fokus pada efisiensi;
2. Perumusan strategi membutuhkan intuisi dan keterampilan analisis yang baik, sedangkan implementasi strategi membutuhkan motivasi dan keterampilan.
3. Perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar sedikit individu, sedangkan implementasi strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu;
4. Perumusan strategi memposisikan daya sebelum tindakan, sedangkan implementasi strategi mengelola daya selama tindakan tersebut berlangsung.

5. Perumusan strategi merupakan proses intelektual, sedangkan implementasi strategi merupakan proses operasional;

II.2.2 Manajemen Strategi

Menurut David (Yulianti, 2018: 4) manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya. Jauch dan Glueck dalam Dewi (2017) menyebutkan bahwa manajemen stratejik sebagai sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran. Menurut Yulianti (2018) manajemen strategi adalah proses sistematis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga keputusan yang diambil berdasarkan proses manajemen strategi diharapkan menjadi sebuah keputusan yang tepat. Menurut Ibrahim (Oja, 2016: 2) manajemen strategis adalah kemampuan manajemen organisasi untuk menadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai manajemen strategi yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Yulianti (2018) secara umum manajemen

strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

II.2.3 Manajemen Strategi di Sektor Publik

Manajemen strategi seperti yang dijelaskan adalah sebagai proses perumusan, implementasi, dan evaluasi secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan, namun tujuan inilah yang membedakan manajemen strategik pada sektor privat dengan manajemen strategik pada sektor publik. Pada sektor privat tujuannya adalah memperoleh laba, sedangkan manajemen strategik sektor publik tujuannya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Menurut Young dalam Bawono (2018) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh hal sebagai berikut:

1. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak;
2. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi;
3. Dominasi profesional;
4. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting;
5. Tidak bermotif mencari keuntungan;
6. Ada kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan;
7. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan.

Bovaird dan Loffler (2009) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah sebuah pendekatan yang menggunakan teknik menejerial untuk menambah nilai uang yang diterima oleh pelayan publik. Roberts dan Menker dalam Bawono (2018) mengusulkan adanya pendekatan generatif dalam manajemen sektor publik, yaitu pendekatan yang menekankan pada pentingnya seorang pemimpin dalam melakukan fungsi penetapan tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan tidak mengesampingkan anggota lain dalam organisasi sektor publik. Menurut Oja (2016) manajemen strategi sektor publik mengarahkan organisasi sektor publik untuk melakukan perencanaan manajemen dengan mempertimbangkan dengan baik faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik, sehingga fokus dari manajemen strategis adalah menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, merumuskan strategi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan memastikan bahwa implementasi strategi berjalan dengan baik.

II.3 Kekerasan Terhadap Perempuan

II.3.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik, dan ekonomi yang

dilakukan individu terhadap individu lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (Hasanah, 2013). Kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang ditunjukkan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu (Avenzora, *et all*, 2017: 18). Penny Naluria Utami (2018) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental.

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Desember 1998 (Avenzora, *et all*, 2017: 15-16) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan akan kemajuan perempuan.

II.3.2 Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat memiliki beberapa penyebab. Hosling (Avenzora, *et all*, 2017: 19) menyatakan bahwa secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor individu dimana terdapat kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan dan faktor sosial dimana kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan.

1. Faktor Individu

Menurut Jacobson (Avenzora, *et all*, 2017: 19) jika dilihat dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan kekerasan dapat dilihat sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan sebagai media mengekspresikan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi, atau sedih. Hosking (Avenzora, *et all*, 2017: 20) berpendapat bahwa faktor utama kecenderungan seseorang untuk berbuat kekerasan adalah kurangnya rasa empati, walaupun seseorang tersebut dilahirkan dengan rasa empati pada dirinya, namun kapasitas rasa empati tersebut bergantung pada apa yang dia lihat dan apa yang dia pelajari dari reaksi orang dewasa terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain. Menurut Johny (2010) sifat-sifat umum dari individu seperti pendidikan individu, umur (manusia mengalami perubahan jasmani dan rohani, dalam tiap masa perubahan manusia dapat melakukan kejahatan), kedudukan individu, dan sex yang berhubungan dengan psikis, semua hal tersebut mempengaruhi tingkah laku seseorang.

2. Faktor Sosial

Lingkungan dapat mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan.

Jacobson (Avenzora, *et all*, 2017: 20) mengidentifikasi beberapa faktor sosial yang bisa saja menciptakan kondisi yang dapat mengantarkan pada terjadinya tindak kekerasan antara lain sebagai berikut:

- a) Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan;
- b) Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan;
- c) Keterpaparan pada kekerasan;
- d) Lingkungan kumuh dan padat penduduk;
- e) Identifikasi peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat;
- f) Sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan.

II.3.3 Jenis-jenis Kekerasan

Kekerasan dibagi kedalam beberapa jenis. UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan membagi kekerasan menjadi 8 kekerasan yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan anggota tubuh (Lestari & Wahyuni, 2018: 24). Amalia (2011) menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menurut Purwandari (Hasanah 2013: 164-165) kekerasan fisik meliputi menampar, mencekik, memukul, dan sebagainya.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Mia Amalia, 2011: 402).

Menurut Purwandari (Hasanah 2013: 165) kekerasan psikologis dapat berbentuk seperti menyumpah, mengancam, berteriak, melecehkan, dan sebagainya.

3. Kekerasan Seksual

Menurut Amalia (2011) kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang. Menurut Purwandari (Hasanah 2013: 165) kekerasan seksual yaitu melakukan tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

4. Eksploitasi Ekonomi

Menurut Octalina (2014) eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

5. Eksploitasi Seksual

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 menyebutkan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh

seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan.

6. Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

7. Penelantaran

Undang-undang Pasal 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 menyebutkan bahwa penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali tersebut. Setiap orang yang atas persetujuan atau perjanjian memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan terhadap orang lain dan tidak dilakukan maka disebut juga dengan penelantaran.

8. Kasus Lain-lain

Kasus lain-lain adalah kasus yang dilaporkan pada UPTD PPA namun diluar kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan penelantaran.

Kasus lain-lain yang pernah ditangani oleh UPTD PPA adalah pada tahun 2020 terjadi kasus *bullying* yang tidak memberikan dampak yang cukup negatif untuk digolongkan dalam kekerasan psikis.

II.3.4 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan yang diterima oleh perempuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Berbagai dampak negatif yang dapat timbul yaitu seperti menurunnya kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Johnson dkk (Avenzora, *et all*, 2017: 21) menyatakan bahwa dampak kekerasan terhadap perempuan secara umum yaitu gangguan kesehatan mental, perubahan perilaku, gangguan kesehatan fisik, gangguan ekonomi, gangguan sosial. Pertama, gangguan kesehatan mental seperti kehilangan rasa percaya diri, trauma, merasa terasing, kesepian, depresi, malu, stress, mudah marah, merasa tak berguna. Kedua, perubahan perubahan perilaku seperti tindakan mengakhiri hidup, makan tidak teratur, serta penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Ketiga, gangguan kesehatan

seperti lebam, sakit kronis, tekanan darah tinggi, luka, sakit punggung, patah tulang, sulit tidur, keguguran, dan lain sebagainya. Keempat, gangguan ekonomi dapat terjadi karena biaya perawatan kesehatan, kehilangan sumber pendapatan, dan lain sebagainya. Kelima, gangguan sosial seperti diskriminasi dan merasa khawatir untuk bersosialisasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Stauss dan Corbin (Salim & Syahrur, 2012: 41) penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi, sehingga penelitian kualitatif berkaitan dengan kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Andriani, *et all*, 2020: 54).

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dibahas membutuhkan pengertian dan pemahaman yang mendalam. Pada penelitian ini diperlukan wawancara di UPTD PPA Kota Balikpapan.

III.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif ditingkat awal pada umumnya hanya menyatakan fokus atau pokok masalah yang kadarnya cukup umum, selain itu penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan, kebaruan informasi dapat berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti (Andriani, *et all*, 2020: 30-31). Menurut Sugiyono (2020) peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, namun keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif terdapat batasan masalah yang disebut juga dengan fokus. Fokus penelitian berguna agar peneliti tidak terjebak pada sekian banyaknya data yang diperoleh. Fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan yang dilaporkan pada UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan
 - a) Pendampingan dan perlindungan terhadap korban
 - b) Koordinasi dengan lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak

2. Strategi UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan dalam menangani kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan

III.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tempat yang menjadi lokasi penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang dinaungi oleh DP3AKB Kota Balikpapan.



Gambar 3.1 UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021

UPTD PPA terletak di Jalan Milono Nomor 30, RT. 46, Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Peneliti memilih UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan sebagai lokasi penelitian karena UPTD PPA memegang peran penting dalam menangani kasus kekerasan di Kota Balikpapan mengingat belum adanya organisasi yang bergerak khusus untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan.

III.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data terdiri dari:

1. Informan

Informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kepala UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan, Ibu Esti Santi Pratiwi.
- b) Anggota LBH SIKAP, Bapak Yohanes Maroko.
- c) Aktivis Perempuan Kota Balikpapan, Ibu Mei Christy.
- d) Humas Aliansi GERAKS (Gerakan Anti Kekerasan Seksual), Saudari Putri Imania.

2. Peristiwa

Peristiwa pada penelitian ini adalah kejadian nyata yang ada disekitar peneliti. Beberapa kasus kekerasan khususnya pada perempuan ada di lingkungan peneliti sehingga mendorong peneliti untuk meneliti strategi

pemerintah dalam menangani kasus kekerasan khususnya pada perempuan di Kota Balikpapan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini adalah bahan tertulis yang memuat informasi mengenai perlindungan perempuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.
- b) Dokumen-dokumen seperti jumlah kasus kekerasan perempuan di Kota Balikpapan yang diberikan oleh UPTD PPA. Selain itu terdapat dokumen seperti salah satunya Peraturan Wali Kota Balikpapan.
- c) Informasi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian

III.5 Jenis Data

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber datanya (Siyoto dan Sodik, 2015: 67-68). Data primer merupakan hasil wawancara langsung dengan informan terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber (Siyoto dan Sodik, 2016: 68). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan.

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian dalam mendapatkan data (Andriani, *et all*, 2020: 120-121). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan secara langsung percakapan dengan maksud tertentu antara dua orang atau lebih yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Andriani, *et all*, 2020: 137-138). Menurut Nazir (Andriani, *et all*, 2020: 138) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Maksud mengadakan wawancara seperti yang dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (Andriani, *et all*, 2020: 138) yaitu untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan, dan beberapa staff yang berada di

UPTD tersebut. Selain Kepala UPTD dan staff, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada atau pengambilan data melalui dokumen-dokumen (Andriani, *et all*, 2020: 149). Menurut Sugiyono (Andriani, *et all*, 2020: 150) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya seperti biografi, catatan, peraturan, dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar misalnya seperti foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya seperti patung, film, dan lain-lain. Dokumen dalam penelitian ini adalah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, dan catatan kasus kekerasan di Kota Balikpapan yang tercatat oleh UPTD PPA.

III.7 Instrumen Penelitian

Peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif, sehingga peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti

kualitatif siap melakukan penelitian dan terjun ke lapangan (Andriani, *et all*, 2020: 116). Menurut Sugiyono (2020) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Andriani, *et al.* (2020) peneliti melakukan validasi terhadap dirinya sendiri melalui evaluasi diri mengenai pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan peneliti, lalu validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Menurut Sugiyono (2020) peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian ini, peneliti menambah pengetahuan dengan mencari berbagai referensi dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti mencari data yang akurat untuk mendukung penelitian ini.

Menurut Nasution (Sugiyono, 2020:295) peneliti sebagai instrumen penelitian pada penelitian kualitatif yaitu karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus;

2. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, sehingga perlu dirasakan dan menyelaminya berdasarkan pengetahuan peneliti;
3. Hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan yang lalu digunakan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan;
4. Respon aneh maupun menyimpang dapat diperhatikan oleh manusia sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Respon yang bahkan bertentangan dapat dipakai untuk mempertimbangkan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti;
5. Peneliti sebagai instrumen memiliki kepekaan dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan akan bermakna atau tidak bagi penelitian;
6. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat mengungkapkan keseluruhan situasi, kecuali manusia;
7. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2020: 294) jika masalah yang diteliti sudah jelas maka instrumen penelitian dapat dikembangkan. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti;
2. Alat-alat pendukung (catatan lapangan, bolpoin, kamera, alat perekam, dan lain-lain);

3. Pedoman Wawancara.

III.8 Metode Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2020: 321) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Andriani, *et all*, 2020: 162). Penelitian kualitatif mendapatkan data dari berbagai sumber, berbagai teknik pengumpulan data, dan dilakukan secara terus menerus sehingga variasi data menjadi tinggi (Andriani, *et all*, 2020: 160). Miles dan Huberman (Andriani, *et all*, 2020: 160-161) menyatakan bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Analisis data model Miles and Huberman memiliki tiga aktivitas yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020: 321). Ketiga aktivitas dalam analisis data Miles and Huberman dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Riyanto (Andriani, *et all*, 2020: 165) reduksi data berarti data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan. Menurut Patilima (Andriani, *et all*, 2020: 164) reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang dilakukan selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menamjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya ditarik dan diverifikasi (Andriani, *et all*, 2020: 164). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2020: 323). Pada alur reduksi data, data-data yang didapatkan dapat disederhanakan.

2. Penyajian Data (*Data Disply*)

Miles dan Huberman (Andriani, *et all*, 2020: 167) menjelaskan bahwa penyajian yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Pada data kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Tujuan dari penyajian data yaitu memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Andriani, *et all*, 2020: 168). Miles and Huberman (Sugiyono,

2020:325) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Fenomena sosial yang bersifat kompleks dan dinamis tidak jarang membuat perkembangan data sehingga peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif (Andriani, *et all*, 2020: 171).

Simpulan harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal, namun rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Jika simpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Andriani, *et all*, 2020: 171).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

IV.1.1 Gambaran Umum Kota Balikpapan

Kota Balikpapan memiliki visi pembangunan daerah Kota Balikpapan pada RPJM 2016-2021 yang sesuai dengan visi kepala daerah terpilih. Visi Kota Balikpapan adalah **“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”**. Madinatul iman mengandung makna yaitu sebagai berikut:

1. Tatanan masyarakat yang beriman, religius, berperadaban maju, dan sejahtera;
2. Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat;
3. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang yang berasaskan pada prinsip moral;
4. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kondisi lingkungan dan suana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas menjadikan Kota Balikpapan sebagai *Livable City* atau Kota Nyaman Dihuni. Hal tersebut tercermin dalam berbagai aspek seperti aspek fisik yang meliputi tata ruang, fasilitas prasarana, fasilitas perkotaan, dan lain-lain, dan aspek non fisik yang meliputi aktivitas ekonomi, hubungan sosial, dan lainnya. *Livable City* memiliki beberapa prinsip diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan;
2. Keamanan, bebas dari rasa takut;
3. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan masilitas sosial seperti taman kota, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, dan transportasi publik;
4. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan seperti air bersih, listrik, hunian yang layak, dan lainnya;
5. Tersedianya ruang dan tempat publik yang digunkana untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
6. Mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya.

Hari jadi Kota Balikpapan diperingati setiap tanggal 10 Februari dimana pada tanggal tersebut pada tahun 1897 pengeboran minyak pertama di Kota Balikpapan dilakukan. Pengeboran Minyak berawal dari kerjasama antara JH Menten dan Firma Samuel & Co dari London. Mr. Adams dari Firma tersebut melakukan penelitian dan menghasilkan

informasi bahwa di Kota Balikpapan memiliki cadangan minyak yang besar. Pengeboran minyak pertama yang terjadi pada Tanggal 10 Februari 1897 mendatangkan keuntungan. Kota Balikpapan kini tidak lagi melakukan pengeboran minyak, namun lebih kepada kegiatan pengolahan minyak mentah yang berasal dari wilayah lain diluar Kota Balikpapan seperti Handil, Tarakan, Sanga-sanga, dan wilayah lainnya. Pengolahan minyak dilakukan di Kilang Minyak yang dibangun pada tahun 1922. Hal tersebut yang menjadikan Kota Balikpapan dijuluki sebagai “Kota Minyak”.

1. Kondisi Geografis Kota Balikpapan

Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang berada di provinsi Kalimantan Timur. Motto Kota Balikpapan adalah “Balikpapan Kubangun, Kujaga, dan Kubela”. Kota Balikpapan memiliki luas wilayah sebesar 843,48 KM² dimana luas daratan sebesar 503,30 KM² dan luas perairan sebesar 340,18 KM². Letak geografis Kota Balikpapan yaitu 1⁰ LS – 1,5⁰ LS dan 116,5⁰ BT – 117,5⁰ BT. Batas wilayah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b) Sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar;
- c) Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Selat Makassar;

- d) Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara;



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Balikpapan

Sumber: balikpapan.go.id

2. Wilayah Administrasi Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 1996, Kota Balikpapan memiliki 5 Kecamatan dan 27 Kelurahan.

Pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor

7 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun

2012, maka Kota Balikpapan terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan.

a) Kecamatan Balikpapan Kota

Kecamatan Balikpapan Kota memiliki luas 210,518 KM² dimana 10,218 KM² adalah wilayah daratan dan 200,3 KM² adalah wilayah perairan. Kecamatan Balikpapan Kota memiliki 5 Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Prapatan dengan luas 3,1412 KM² yang terbagi menjadi 36 RT
- 2) Kelurahan Telaga Sari dengan luas 2,538 KM² yang terbagi menjadi 28 RT
- 3) Kelurahan Klandasan Ulu dengan luas 0,89 KM² yang terbagi menjadi 53 RT
- 4) Kelurahan Klandasan Ilir dengan luas 1,435 KM² yang terbagi menjadi 57 RT
- 5) Kelurahan Damai dengan luas 2,221 KM² yang terbagi menjadi 16 RT

b) Kecamatan Balikpapan Barat

Kecamatan Balikpapan Barat memiliki luas 217,442 KM² dimana 179,952 KM² adalah wilayah daratan dan 37,49 KM² adalah wilayah perairan. Kecamatan Balikpapan Barat memiliki 6 Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Baru Ilir dengan luas 0,589 KM² yang terbagi menjadi 62 RT

2) Kelurahan Margo Mulyo dengan luas 1,8453 KM² yang terbagi menjadi 39 RT

3) Kelurahan Marga Sari dengan luas 0,665 KM² yang terbagi menjadi 30 RT

4) Kelurahan Baru Tengah dengan luas 0,5704 KM² yang terbagi menjadi 43 RT

5) Kelurahan Baru Ulu dengan luas 0,9548 KM² yang terbagi menjadi 40 RT

6) Kelurahan Kariangau dengan luas 175,3275 KM² yang terbagi menjadi 9 RT

c) Kecamatan Balikpapan Utara

Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas 132,1662 KM² yang seluruhnya merupakan wilayah daratan. Kecamatan Balikpapan Utara memiliki 6 Kelurahan sebagai berikut:

1) Kelurahan Gunung Samarinda dengan luas 2,703 KM² yang terbagi menjadi 47 RT

2) Kelurahan Muara Rapak dengan luas 3,5272 KM² yang terbagi menjadi 87 RT

3) Kelurahan Baru Ampar dengan luas 10,553 KM² yang terbagi menjadi 58 RT

4) Kelurahan Karang Joang dengan luas 93,0904 KM² yang terbagi menjadi 42 RT

5) Kelurahan Gunung Samarinda Baru dengan luas 3,035 KM² yang terbagi menjadi 20 RT

6) Kelurahan Graha Indah dengan luas 19,254 KM² yang terbagi menjadi 36 RT

d) Kecamatan Balikpapan Tengah

UPTD PPA sebagai lokasi penelitian berada di Kecamatan Balikpapan Tengah. Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki luas 21,0438 KM² dimana 11,0738 KM² adalah wilayah daratan dan 9,97 KM² adalah wilayah perairan. Kecamatan Balikpapan tengah memiliki 6 Kelurahan sebagai berikut:

1) Kelurahan Gunung Sari Ilir dengan luas wilayah 1,1410 KM² yang terbagi menjadi 69 RT. UPTD PPA yang menjadi lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Gunung Sari Ilir.

2) Kelurahan Gunung Sari Ulu dengan luas 1,8252 KM² yang terbagi menjadi 34 RT

3) Kelurahan Mekar Sari dengan luas 1,2866 KM² yang terbagi menjadi 35 RT

4) Kelurahan Karang Rejo dengan luas 1,2050 KM² yang terbagi menjadi 66 RT

5) Kelurahan Sumber Rejo dengan luas 2,205 KM² yang terbagi menjadi 44 RT

6) Kelurahan Karang Jati dengan luas 3,411 KM² yang terbagi menjadi 37 RT

e) Kecamatan Balikpapan Selatan

Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki luas 238,118 KM² dengan 37,818 KM² adalah wilayah daratan dan 200,3 KM² adalah wilayah perairan. Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki 7 Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Damai Baru dengan luas 2,149 KM² yang terbagi menjadi 33 RT
- 2) Kelurahan Damai Bahagia dengan luas 3,708 KM² yang terbagi menjadi 43 RT
- 3) Kelurahan Sepinggian Baru dengan luas 10,618 KM² yang terbagi menjadi 40 RT
- 4) Kelurahan Sungai Nangka dengan luas 3,204 KM² yang terbagi menjadi 27 RT
- 5) Kelurahan Sepinggian Raya dengan luas 6,588 KM² yang terbagi menjadi 31 RT
- 6) Kelurahan Gunung Bahagia dengan luas 3,753 KM² yang terbagi menjadi 50 RT
- 7) Kelurahan Sepinggian dengan luas 7,812 KM² yang terbagi menjadi 45 RT

f) Kecamatan Balikpapan Timur

Kecamatan Balikpapan Timur memiliki luas 229,578 KM² dengan 137,158 KM² adalah wilayah daratan dan 92,42 KM² adalah wilayah

perairan. Kecamatan Balikpapan Timur memiliki 4 Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Manggar dengan luas 35,225 KM² yang terbagi menjadi 30 RT
- 2) Kelurahan Manggar Baru dengan luas 3,836 KM² yang terbagi menjadi 26 RT
- 3) Kelurahan Lemaru dengan luas 48,555 KM² yang terbagi menjadi 13 RT
- 4) Kelurahan Teritip dengan luas 49,512 KM² yang terbagi menjadi 24 RT

3. Kondisi Demografi Kota Balikpapan

Berdasarkan data dari BPS Kota Balikpapan jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Balikpapan Selatan	67.066	62.775	129.841
Balikpapan Kota	47.479	44.553	92.032
Balikpapan Timur	36.296	33.738	70.034

Balikpapan Utara	73.478	68.937	142.415
Balikpapan Tengah	58.792	55.681	114.473
Balikpapan Barat	50.236	46.696	96.932
Kota Balikpapan	333.347	312.380	645.727

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan

Sumber: BPS Kota Balikpapan

Masyarakat Kota Balikpapan memiliki beragam kepercayaan.

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kota Balikpapan adalah Islam. Berdasarkan Arsip Nasional Republik Indonesia, agama yang dianut penduduk Kota Balikpapan antara lain Aliran kepercayaan sebesar 0,03%, Budha sebesar 0,62%, Hindu sebesar 0,46%, Katolik sebesar 2,86%, Kristen Protestan sebesar 6,38%, dan Islam sebesar 89,69%.

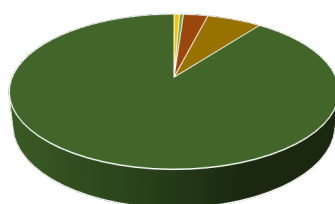


Diagram 4.1 Agama di Kota Balikpapan

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

IV.1.2 Gambaran Umum DP3AKB Kota Balikpapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana atau yang biasa disingkat dengan DP3AKB adalah dinas yang

berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Balikpapan terletak di Jalan MT. Haryono RT.26 NO. 186

Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan. DP3AKB Kota

Balikpapan dikepalai Sri Wahyuningsih.

1. Dasar Pembentukan DP3AKB Kota Balikpapan

Terdapat beberapa peraturan yang mendasari terbentuknya

DP3AKB Kota Balikpapan antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

d) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan

kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

i) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;

k) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

l) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

2. Tugas DP3AKB Kota Balikpapan

Tugas DP3AKB terdapat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 4. Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya.

3. Fungsi DP3AKB Kota Balikpapan

Fungsi DP3AKB Kota Balikpapan terdapat pada Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 5. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

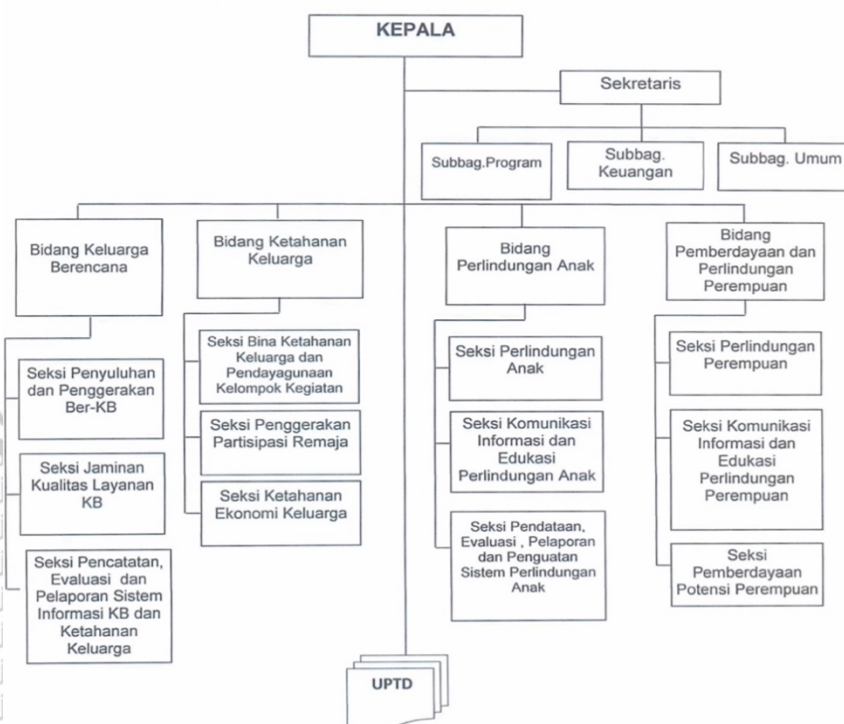
- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan, Lima Tahun, dan Jangka Panjang terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;

- d) Pelaksanaan pemanduan dan sinkronasi kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- e) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi KB yang diberikan Pemerintah Pusat;
- h) Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB Mobile yang bersifat sosial (KB Momentum/KB Keliling);
- i) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- j) Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan Program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur DP3AKB Kota Balikpapan

DP3AKB Kota Balikpapan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki stuktur organisasi seperti gambar yang terdapat dibawah ini:



Gambar 4.2 Stuktur Organisasi DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: balikpapan.go.id

Dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016

Pasal 6, dijelaskan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 4 dan Pasal 5;
- b) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 7, Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian sebagai berikut:

- a) Penyusunan program;
- b) Pengelolaan urusan keuangan;
- c) Kepegawaian;
- d) Rumah tangga kantor;
- e) Perlengkapan;
- f) Protokol
- g) Hubungan masyarakat;
- h) Layanan informasi dan pengaduan;
- i) Pembinaan pelayanan publik;
- j) Kearsipan;

k) Surat menyurat; dan

l) Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 13, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan membawahi seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 17, Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan Bidang Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan Anak membawahi seksi dan setiap

seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 22, Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan Bidang Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keluarga Berencana membawahi seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 27, Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan Bidang Ketahanan Keluarga. Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketahanan Keluarga membawahi seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Peran DP3AKB Kota Balikpapan dalam Kasus Kekerasan

DP3AKB sebagai bagian dari pemerintah tentunya memiliki peran dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kota Balikpapan. DP3AKB bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka

pencegahan kasus kekerasan. DP3AKB telah mengedukasi masyarakat melalui radio maupun terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai kasus kekerasan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Esti selaku Ketua UPTD PPA.

“hal tersebut (edukasi kekerasan) bukan kapasitas kami, hal tersebut merupakan ranah DP3AKB. Hal tersebut meliputi edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat merupakan ranah Dinas, waktu saya masih berkerja di Dinas, saya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan juga melalui forum anak baik tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Selain itu juga Dinas juga telah mengedukasi masyarakat melalui media sosial dan radio. Pada radio KPFM sering diinformasikan seperti bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh, menginformasikan letak UPTD PPA, dan apa saja tugas UPTD.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA di UPTD PPA Kota Balikpapan, 14 Desember 2020)

DP3AKB tidak jarang menginformasikan kepada masyarakat bahwa di Kota Balikpapan terdapat UPTD PPA yang dapat dihubungi oleh masyarakat yang mendapatkan kekerasan ataupun menyaksikan kasus kekerasan. Selain itu, DP3AKB juga bertugas untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi baik yang dialami langsung ataupun dilihat.

IV.1.3 Gambaran Umum UPTD PPA Kota Balikpapan

Sebelum UPTD PPA terbentuk, terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang kerap disebut dengan P2TP2. P2TP2A merupakan lembaga masyarakat, namun seiring dengan bertambahnya kasus kekerasan yang terjadi khususnya di Kota

Balikpapan, pemerintah merasa memerlukan lembaga sendiri yang khusus untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi baik kepada perempuan maupun anak-anak. Pada akhirnya, dibentuklah UPTD PPA untuk menggantikan P2TP2A. Pembentukan UPTD PPA merupakan wujud implementasi perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana UU tersebut mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam menjalankan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1, UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA Kota Balikpapan memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan. UPTD PPA Kota Balikpapan adalah bentuk implementasi dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2019 Pasal 3 bahwa UPTD PPA dipimpin oleh seorang kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. UPTD PPA Kota Balikpapan terletak di Jalan Milono RT.46 NO. 30 Kelurahan Gunungsari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah. UPTD PPA Kota Balikpapan melayani berbagai jenis klien salah satunya adalah perempuan dan/ atau anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), perdagangan orang, dan korban eksploitasi seksual.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Pasal 6, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, terdapat lima jenis klien yang dilayani oleh UPTD PPA. Kelima jenis klien tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang tidak atau belum ditangani institusi atau perangkat daerah;
2. Anak sebagai korban tindak pidana;
3. Anak sebagai saksi kasus pidana;
4. Anak yang berkonflik dengan hukum;
5. Perempuan dan atau anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), perdagangan orang dan korban eksploitasi seksual.



Gambar 4.3 Tampak Depan UPTD PPA Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021

1. Tugas UPTD PPA Kota Balikpapan

UPTD PPA Kota Balikpapan memiliki tugas-tugas yang tertera dalam Perwali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 5 sebagai berikut:

a) Pengaduan masyarakat;

- b) Penjangkauan klien;
- c) Pengelolaan kasus;
- d) Penampungan sementara;
- e) Mediasi;
- f) Pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan; dan
- g) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPTD.

2. Fungsi UPTD PPA Kota Balikpapan

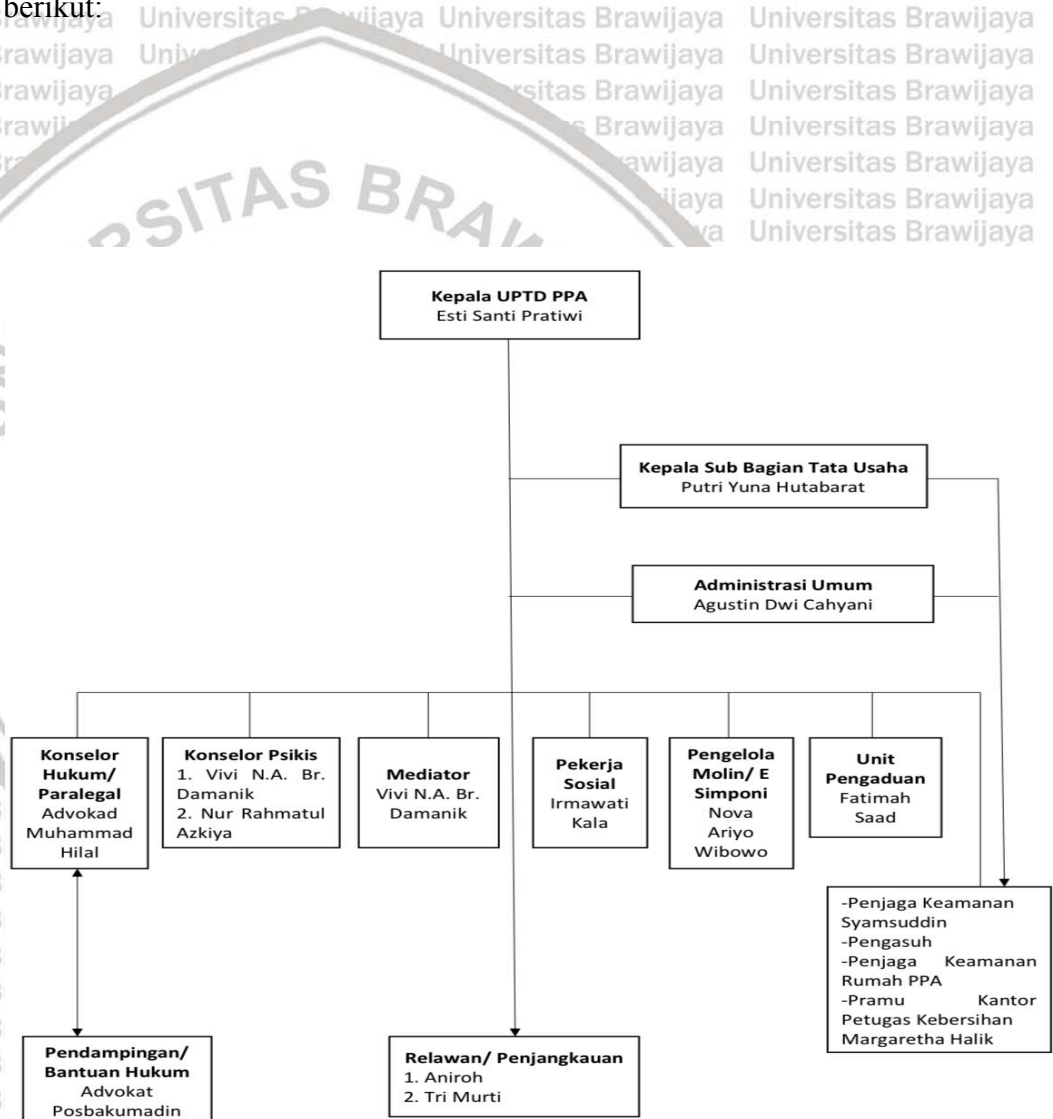
UPTD PPA Kota Balikpapan memiliki fungsi-fungsi yang tertera dalam Perwali Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2019 Pasal 7 sebagai berikut;

- a) Penyusunan rencana teknis operasional kinerja UPTD;
- b) Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan kegiatan operasional dengan bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD;
- c) Pelaksanaan pengendalian, pengoordinasian dan operasional layanan;
- d) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian personil/ sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
- e) Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian serta pengelolaan urusan kerumahtanggaan rumah penampungan sementara/ rumah perlindungan;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD; dan

- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

3. Struktur UPTD PPA Kota Balikpapan

Struktur UPTD PPA Kota Balikpapan adalah seperti gambar berikut:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Balikpapan

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

Struktur UPTD PPA antara lain terdiri dari Ketua UPTD PPA, Kepala Subbagian Tata Usaha, Administrasi Umum, Konselor Hukum atau Paralegal, Konselor Psikis, Mediator, Pekerja Sosial, Pengelola Molin atau E-Simponi, Unit Pengaduan, Pendampingan atau Bantuan Hukum, Relawan atau Penjangkauan, Penjaga Keamanan, Pengasuh, Penjaga Keamanan Rumah PPA, dan Pramu Kantor sekaligus Penjaga Kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 7, Ketua UPTD PPA memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 dan Pasal 7;
- b) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta bertanggung jawab atas kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 1, Subbagian Tata Usaha memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- a) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program;
- b) Keuangan;

- c) Ketatausahaan;
- d) Rumah Tangga;
- e) Perlengkapan;
- f) Kepegawaian dan kehumasan; dan
- g) Pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 2, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD;
- b) Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
- c) Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- d) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan rumah penampungan sementara;
- e) Pengelolaan pusat layanan informasi UPTD
- f) Penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 3.

Berdasarkan kempppa.go.id, jabatan pelaksana terdiri dari antara lain sebagai berikut:

- a) Konselor Psikologi atau Konselor Hukum yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi atau hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali;
- b) Mediator yang memiliki tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c) Pengadministrasian Umum yang memiliki tugas melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi;
- d) Pengemudi yang memiliki tugas melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas;
- e) Petugas Keamanan yang memiliki tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban;
- f) Penjaga Asrama yang memiliki tugas melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai bidangnya. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Ketua UPTD. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/m. PAM/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikologis Klinis dan Angka Kreditnya Pasal 1, bahwa Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Tugas dari Psikolog Klinis adalah memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi, hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan masalah psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Pasal 1, bahwa Pekerja Sosial Adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan atau organisasi sosial lainnya. Tugas dari Pekerja Sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Peran UPTD PPA Kota Balikpapan dalam Kasus Kekerasan

Tidak seperti peran DP3AKB, UPTD PPA memiliki peran menangani kasus kekerasan yang telah terjadi, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Esti selaku Ketua UPTD PPA.

“UPTD menangani kasus yang telah terjadi.” (Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

UPTD PPA memiliki peran sebagai pendamping maupun pelindung dari korban-korban kekerasan yang ada di Kota Balikpapan. UPTD PPA memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban kekerasan secara gratis. Salah satu contoh bantuan atau layanan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban kekerasan adalah bantuan rehabilitasi kesehatan, bantuan rehabilitasi psikis, bantuan hukum, dan lain-lain. UPTD PPA memiliki rumah perlindungan yang lokasinya dirahaskan guna untuk memberikan rasa aman kepada para korban kekerasan. Tidak hanya kepada korban, UPTD PPA juga memberikan edukasi kepada keluarga korban kekerasan agar dapat membantu korban untuk kembali

bersosialisasi dengan lingkungannya pasca mengalami kekerasan sesuai dengan pemaparan Ibu Esti Selaku Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan.

“jika korbannya anak kami akan mengedukasi orangtua dan nanti diharapkan orangtua akan mengedukasi anaknya, namun ada beberapa korban anak-anak yang menjadi korban karena kemauannya sendiri misalnya karena efek penggunaan *gadget*, nah kami akan edukasi orangtua, jika korban adalah perempuan dewasa tidak ada pendampingan terhadap keluarga korban karena korban sudah bisa berfikir sendiri dan yang akan kami edukasi adalah si korban, jadi selain didampingi mungkin di bidang kesehatan maupun psikologis maupun hukum, kami juga mengedukasi si korban.”
(Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 19 Mei 2021)

IV.2 Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Balikpapan

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan pelakunya berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki yang kerap terjadi karena adanya ketimpangan antara pelaku dan korban (kemenpppa.go.id). Kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap perempuan jika perempuan korban kekerasan berusia minimal 18 tahun ke atas atau disebut dengan perempuan dewasa.

Kekerasan terjadi pada perempuan maupun laki-laki yang berumur dibawah 18 tahun maka tergolong kekerasan terhadap anak.

Organisasi pemerintah yang berperan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Keluarga atau yang disingkat dengan DP3AKB. Pada struktur

DP3AKB terdapat UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang memiliki tugas dibidang perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, UPTD PPA merupakan bagian dari DP3AKB yang tidak dapat dipisahkan.

DP3AKB dan UPTD PPA memiliki relasi dalam mencegah maupun menangani kasus kekerasan khususnya di Kota Balikpapan. DP3AKB memiliki tugas pada pencegahan atau sebelum kasus kekerasan terjadi, sesuai dengan pemaparan Ibu Esti selaku Kepala UPTD PPA.

“untuk pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi adalah ranah DP3AKB, dan UPTD menangani kasus yang telah terjadi.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020).

Tugas dari DP3AKB adalah mengedukasi masyarakat mengenai kasus kekerasan, apa saja yang termasuk kekerasan, dan menginformasikan apa yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan atau menyaksikan kekerasan. DP3AKB kerap memberikan informasi mengenai adanya UPTD PPA yang bertugas untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan. Edukasi yang diberikan oleh DP3AKB yaitu melalui radio maupun media cetak seperti koran, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Esti selaku kepala UPTD PPA.

“hal tersebut (edukasi kekerasan) bukan kapasitas kami, hal tersebut merupakan ranah DP3AKB. Hal tersebut merupakan edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat merupakan ranah Dinas. Kedua hal tersebut sudah dilakukan dan sudah sering dilakukan mulai dari tingkat sekolah, pkk, posyandu, dan lain-lain. DP3AKB sering memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki UPTD PPA dan mensosialisasikan

mengenai UPTD, dan memberikan informasi kepada masyarakat kemana harus melapor jika mendapat kekerasan.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

Sementara untuk perempuan dan anak yang telah mengalami kekerasan akan ditangani oleh UPTD PPA. UPTD PPA bertugas untuk mendampingi korban dari korban melapor hingga kasus selesai dan korban kembali ke masyarakat. Beberapa contoh pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA adalah bantuan hukum, konseling, dan lain-lain.

Penangan Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Balikpapan ditangani dalam beberapa tahap. Korban yang tercatat di UPTD PPA antara lain adalah korban yang datang sendiri ke UPTD PPA untuk meminta bantuan mengenai kasus kekerasan yang dialami, korban rujukan adalah korban yang dirujuk dari polsek, atau polres, atau PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan lain-lain, sementara korban penjangkauan adalah korban yang dijangkau oleh UPTD PPA karena adanya keterbatasan dari pihak korban sehingga tidak mampu untuk datang ke UPTD PPA.

“Korban rujukan seperti contohnya yang berasal dari Polres, korban melaporkan bisa saja ke Polsek, atau Polres, atau PUSPAGA. Sehingga dapat dikatakan korban pertama kali melapor tidak ke UPTD PPA, lalu diarahkan di UPTD PPA. Selanjutnya untuk korban penjangkauan misalnya kami mendapat informasi bahwa ada korban kekerasan di daerah x dan korban tidak dapat datang ke UPTD PPA, maka kami jangkau kami datangi.” (Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 3 Februari 2021)

Langkah selanjutnya adalah tahap pengaduan identifikasi yang terdiri dari *screening* yaitu penyaringan korban ke dalam kriteria tertentu, lalu asesmen

yang merupakan tindak lanjut dari *screening* agar dapat mengetahui kebutuhan korban, dan yang terakhir adalah rencana intervensi yang berisi tentang dari rencana jangka panjang mengenai tindak lanjut kasus yang korban alami. Setelah korban melalui tahap pengaduan identifikasi, korban akan melakukan administrasi dan pendataan, jika korban membutuhkan bantuan untuk tindak lanjut maka korban akan mendapatkan rehabilitasi kesehatan, atau rehabilitasi sosial, atau bantuan hukum sesuai dengan kasus yang dialami.

“Kita akan mengasesmen klien yang datang, hal tersebut merupakan identifikasi, kami melihat tersebut apakah butuh ke tahap konseling terlebih dahulu atau langsung dilanjutkan ke PPA Polres jika memang kami sudah mengerti kasus yang terjadi. Setelah diidentifikasi maka ditentukan langkah apa yang akan diambil. Asesmen sama dengan *screening*. Ketika kami sudah tau apa permasalahannya dan prosesnya sudah berjalan, lalu intervensinya seperti apa ?, misalnya sudah kami tangani, korban sudah sampai ke PPA Polres dan sudah visum misalnya, dan intervensi kami apa ? bisa saja bentuk intervensi kita menanyakan ke PPA Polres mengenai keberlanjutan kasus tersebut, jika misal korban akan melakukan sidang lalu apa rencana kami berikutnya ? misalnya kami harus memanggil atau menjangkau klien untuk disiapkan pada waktu sidang, lalu jika sudah selesai sidang apa lagi rencana kami selanjutnya ? misalnya kami akan berbicara dengan pihak keluarga korban menanyakan keadaan korban dan mengedukasi keluarga bagaimana keberlanjutannya. Sehingga rencana intervensi adalah rencana kedepannya.” (Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 3 Februari 2021)

Pada tahap rehabilitasi kesehatan terdapat beberapa pelayanan seperti pelayanan non kritis dimana korban berkonsultasi mengenai kasus yang sedang dihadapi, pelayanan semi kritis adalah pelayanan yang diberikan kepada korban yang memiliki luka ringan, pelayanan kritis adalah pelayanan yang diberikan kepada korban dengan luka berat misalnya adalah korban yang

dirujuk dari UGD, dan pelayanan medikolegal yang berkaitan dengan medis guna untuk penegakan hukum.

“Non-kritis biasanya korban hanya berkonsultasi mengenai kasus yang dialami. Korban akan diberikan pelayanan semi-kritis jika mengalami luka fisik, misalnya klien yang diterima UGD dengan kondisi luka-luka, sehingga penanganannya tidak hanya dari kami. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan yang dilakukan melalui medis seperti visum.” (Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 3 Februari 2021)

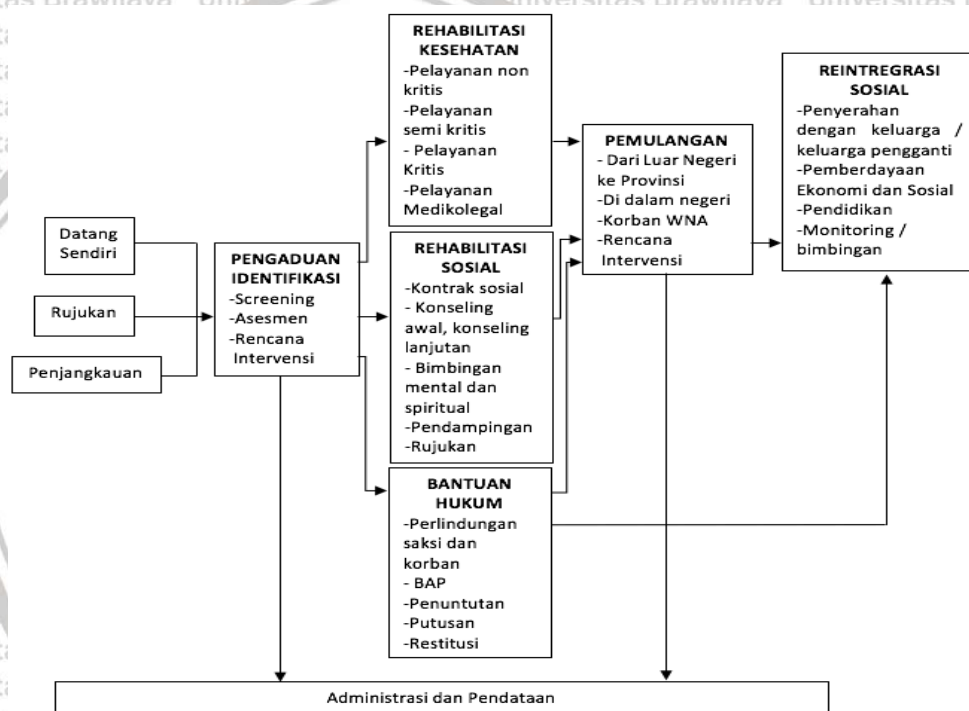
Selain rehabilitas kesehatan, korban juga dapat mendapatkan rehabilitasi sosial dan korban membuat kontrak sosil dimana korban menandatangani pernyataan dimana korban bersedia untuk dibantu dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami, konseling awal dan konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, serta rujukan.

“klien datang lalu di asesmen dan klien meminta bantuan sehingga klien bertanda tangan layaknya kontrak. Sedangkan konseling awal adalah konseling pertama. Biasanya ketika klien datang pertama kali masih belum terbuka sehingga butuh konseling lanjutan.” (Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 3 Februari 2021)

UPTD PPA juga dapat memberikan bantuan hukum disamping rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. Bantuan hukum yang diberikan berupa perlindungan saksi dan korban. Korban yang telah mendapatkan pelayanan berupa rehabilitasi kesehatan, atau rehabilitasi sosial, maupun bantuan hukum maka selanjutnya korban akan dipulangkan dan akan dilakukan lagi administrasi dan pendataan. Korban yang telah dipulangkan juga masih bisa mendapatkan pelayanan salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi. Pada tahap terakhir korban akan melakukan tahap administrasi dan pendataan

kembali. UPTD PPA Kota Balikpapan juga memiliki rumah perlindungan yang lokasinya dirahasiakan demi menjaga keamanan dari korban kekerasan.

“kami punya rumah perlindungan, kami juga memberikan perlindungan identitas terutama kepada anak sesuai dengan amanat undang-undang, semua identitas seperti nama, alamat, dan lainnya akan kami lindungi.” (Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 19 Mei 2021)



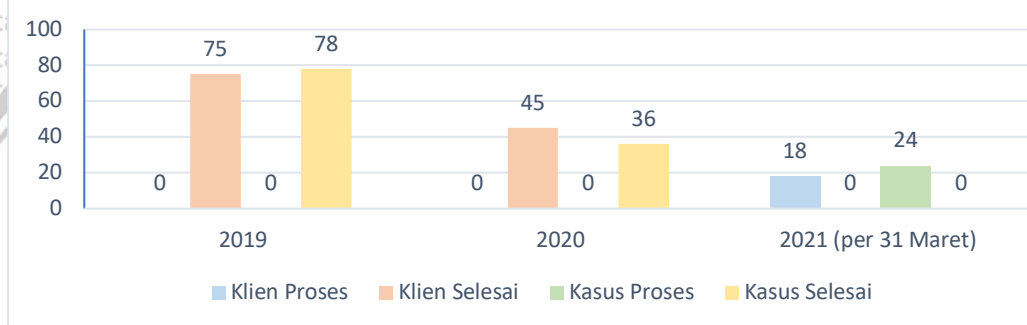
Gambar 4.5 Alur Penanganan Kasus Kekerasan di UPTD PPA

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada 14 April 2021 mengenai kasus kekerasan baik yang diterima olah anak laki-laki, anak perempuan, dan perempuan dewasa yang tercatat di UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 154 kasus kekerasan dengan status

24 kasus yang masih dalam proses dan 130 kasus yang telah selesai diproses, selain itu juga terdapat 138 klien dengan status 18 klien yang masih dalam proses dan 120 klien yang telah selesai diproses.

JUMLAH KASUS DAN KLIEN DI UPTD PPA KOTA BALIKPAPAN



Grafik 4.1 Jumlah kasus dan klien di UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan dari tahun 2019-2021

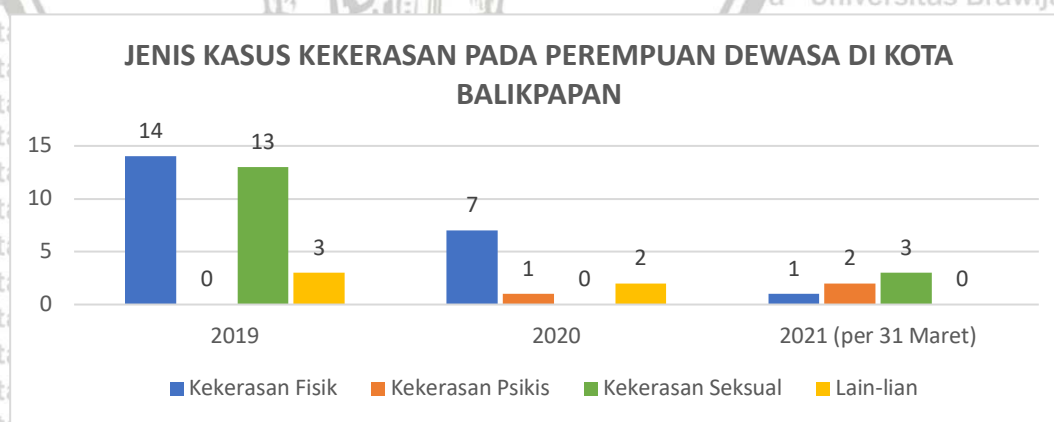
Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

Klien dapat mengalami beberapa kasus sekaligus sehingga dapat dilihat pada Grafik 4.1 bahwa jumlah kasus selalu lebih tinggi dari jumlah klien. Pada tahun 2019 terdapat 78 kasus dengan status 0 kasus proses dan 78 kasus selesai, lalu terdapat 75 klien dengan status 0 klien proses dan 75 klien selesai. Pada tahun 2020 terdapat 52 kasus dengan status 0 kasus proses dan 52 kasus selesai, lalu terdapat 45 klien dengan status 0 klien proses dan 45 klien selesai. Kasus

kekerasan yang tercatat di UPTD PPA adalah kasus kekerasan dilaporkan pada UPTD PPA, oleh karena itu data tersebut tidak menggambarkan kasus kekerasan yang sebenarnya mengingat banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan.

“Banyak tidaknya laporan bukan patokan banyak atau tidaknya kasus kekerasan, mungkin saja laporan sedikit karena masyarakat takut untuk melapor, atau semua kasus memang sudah dilaporkan. Tidak usah takut dengan kasus yang banyak karena mungkin masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk melapor. Hal yang penting adalah bagaimana kasus yang dilaporkan dapat ditangani dengan baik. Jika banyak masyarakat yang berani untuk melapor maka hal tersebut adalah keberhasilan DP3AKB yang telah mengedukasi masyarakat.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

Jenis kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kota Balikpapan sangat beragam, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan orang, penelantaran, dan lain-lain.



Grafik 4.2 Jenis Kasus kekerasan pada perempuan dewasa mulai dari tahun 2019-2021

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada tanggal 14 April 2021 mengenai kasus kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 30 kasus dengan rincian 14 kasus kekerasan fisik, 13 kasus kekerasan seksual, dan 3 kasus lain-lain yang dialami oleh perempuan dewasa di Kota Balikpapan. Pada tahun 2020 pertanggal terdapat 10 kasus dengan rincian 7 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 2 kasus lain-lain yang dialami oleh perempuan dewasa di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2021 (per 31 Maret) terdapat 6 kasus dengan rincian 1 kasus kekerasan fisik, 2 kasus kekerasan psikis, dan 3 kasus kekerasan seksual.

Di Kota Balikpapan masih sedikit organisasi non pemerintah yang bergerak untuk membantu perempuan di Kota Balikpapan yang mengalami kekerasan sesuai dengan informasi dari Ibu Esti selaku Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan, namun terdapat LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang membantu perempuan dalam menangani kasus kekerasan.

“sampai saat ini belum ada (organisasi yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak), dan belum ada organisasi atau LSM non pemerintah yang membantu dalam penanganan kasus kekerasan perempuan.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 desember 2020)

Pernyataan dari Bapak Yohanes selaku anggota LBH SIKAP juga menyampaikan hal serupa.

“setahu saya belum ada (organisasi yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak), dan kasus-kasus kekerasan yang terjadi ditangani langsung oleh PPA.” (Wawancara dengan anggota LBH SIKAP di Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 14 Februari 2021)

JUMLAH KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DEWASA YANG DITANGANI LBH SIKAP DARI TAHUN 2019-2021



Grafik 4.3 Jumlah Kasus kekerasan pada perempuan dewasa yang ditangani

LBH SIKAP dari Tahun 2019-2021

Sumber: LBH SIKAP Balikpapan

Lembaga Bantuan Hukum SIKAP atau LBH SIKAP adalah salah satu lembaga bantuan hukum di Kota Balikpapan yang menangani 1 kasus kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan. Hal tersebut terjadi karena kasus kekerasan yang dilaporkan di Kepolisian jarang ada yang dilanjutkan ke meja hijau karena korban dan pelaku tak jarang sudah berdamai terlebih dahulu. Selain itu, kasus kekerasan dapat dibantu oleh LBH jika pelaku kekerasan tersebut sekiranya akan mendapat hukuman diatas 5 tahun sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Yohanes selaku anggota LBH SIKAP.

“LBH jarang sekali menangani kasus kekerasan karena kasus kekerasan baik KDRT maupun tidak biasanya hanya sampai ke kepolisian. Kedua belah pihak biasanya berdamai secara kekeluargaan di kepolisian dan jarang sampai ke meja hijau. LBH membantu kasus-kasus kekerasan yang sekiranya hukumannya akan diatas 5 tahun, sementara jika korban ditampar atau kekerasan yang tidak terlalu serius maka hukumannya relatif rendah dibawah 1 tahun.” (Wawancara dengan anggota LBH SIKAP di Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 14 Februari 2021)

Selain LBH SIKAP, juga terdapat Aliansi GERAKS (Gerakan Anti Kekerasan Seksual) yang baru saja terbentuk pada bulan Maret 2021 yang telah melakukan demonstrasi pada tanggal 8 Maret 2021 sebagai bentuk peringatan *International Women's Day*. Pada aksi demonstrasi tersebut Aliansi GERAKS menyampaikan dua tuntutan yaitu wujudkan Kota Balikpapan tanpa predator seksual, dan mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PKS.

“Aliansi ini juga baru terbentuk setelah IWD 2021 (*International Women's Day*). Kami berencana untuk melanjutkan aliansi ini yang diharapkan dapat melindungi perempuan korban kekerasan, namun masih terkendala dengan urusan internal Aliansi GERAKS. Dalam aliansi ini belum ada pemahaman konteks.” (Wawancara dengan Saudarai Putri selaku Humas Geraks via *Whatsapp*, tanggal 9 April 2021)

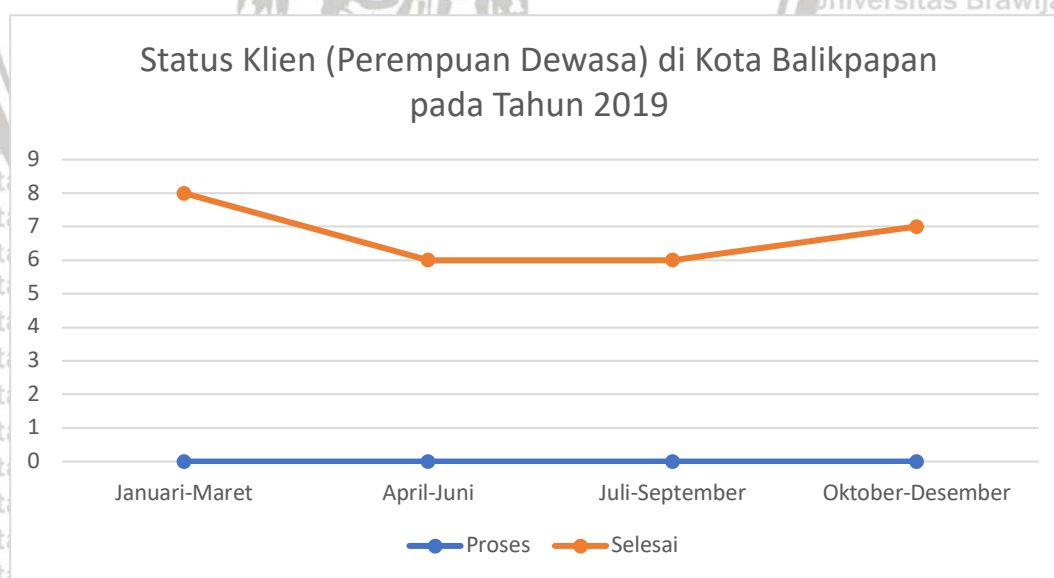
Selain LBH SIKAP dan Aliansi GERAKS, peneliti juga mewawancarai salah satu anggota Solidaritas Dayak yang merupakan salah satu aktivis perempuan di Kota Balikpapan yaitu Ibu Mei Christy. Solidaritas Dayak pernah membantu 1 kasus kekerasan di Kota Samarinda.

“Solidaritas Dayak baru 1 kali membantu korban kekerasan yaitu ada 1 kasus di Kota Samarinda yang melibatkan tokoh Dayak sebagai pelaku. Solidaritas Dayak merupakan gabungan beberapa organisasi Dayak dan organisasi masyarakat yang prihatin.” (Wawancara dengan anggota Solidaritas Dayak sekaligus aktivis perempuan Kota Balikpapan via *Whatsapp*, tanggal 1 April 2021)

Kekerasan terhadap perempuan memiliki jenis yang beragam. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah kekerasan fisik yaitu kekerasan yang melibatkan anggota tubuh, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketakutan dan lain-lain, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang mengarah pada desakan seksual, eksploitasi ekonomi yaitu pemanfaatan berlebihan untuk kepentingan ekonomi, eksploitasi seksual yaitu

kekerasan seperti pemanfaatan organ tubuh seksual, perdagangan orang, penelantaran, dan lain-lain. Kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan didominasi oleh jenis kasus kekerasan fisik. Selain kekerasan fisik, terdapat kasus kekerasan seksual dan kekerasan kategori kasus lain-lain di Kota Balikpapan. Kasus kekerasan lain-lain di Kota Balikpapan yang terjadi pada tahun 2020 adalah kasus *bullying* yang tidak memberikan dampak cukup negatif untuk digolongkan dalam kasus kekerasan psikis.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada tanggal 14 April 2021 mengenai kasus kekerasan pada perempuan di Kota Balikpapan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 27 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan di Kota Balikpapan.

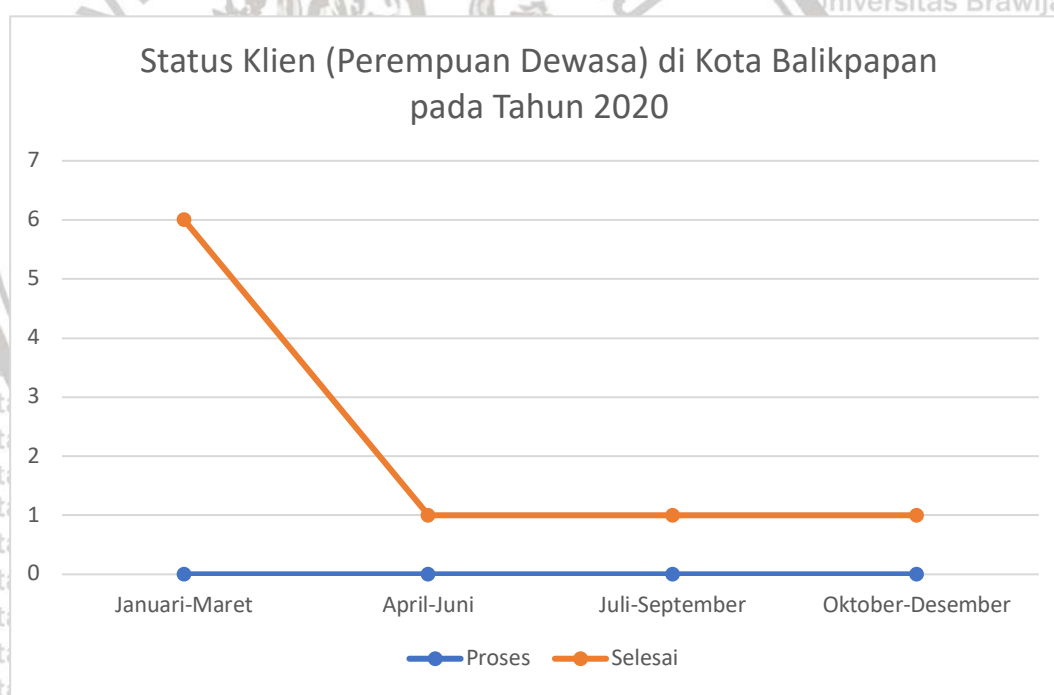


Grafik 4.4 Status klien (perempuan dewasa) yang mendapat kekerasan di Kota Balikpapan pada Tahun 2019

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

Pada bulan Januari-Maret terdapat 8 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan dan telah selesai ditangani, lalu pada bulan April-Juni terdapat 6 korban, pada bulan Juli-September terdapat 6 korban, dan pada bulan Oktober-Desember terdapat 7 korban. Semua kasus yang dilaporkan oleh 27 korban di tahun 2019 telah selesai ditangani.

Pada tahun 2020 terdapat 9 perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan.



Grafik 4.5 Status klien (perempuan dewasa) yang mendapat kekerasan di Kota Balikpapan pada Tahun 2020

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

Pada bulan Januari-Maret terdapat 6 korban, pada bulan April-Juni terdapat 1 korban, pada bulan Juli-September terdapat 1 korban, dan pada bulan Oktober-Desember terdapat 1 korban. Semua kasus yang telah dilaporkan oleh 9 korban pada tahun 2020 telah selesai ditangani.

Menurut Hosling (Avenzora, *et all*, 2017: 19) terdapat dua faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor Individu yaitu suatu kondisi dimana terdapat kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Menurut Jacobson (Avenzora, *et all*, 2017: 19) jika dilihat dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan kekerasan dapat dilihat sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan sebagai media mengekspresikan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi, atau sedih. Selain Faktor individu, terdapat faktor sosial yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Faktor sosial yaitu suatu kondisi dimana kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan salah satu contohnya adalah kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan sebagian besar terjadi karena faktor individu dimana pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan karena tidak mampu menahan emosi atau kondisi pelaku yang mengekspresikan perasaan marah, frustrasi, atau sedih.

IV.3 Strategi dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Balikpapan

Pemerintah Kota Balikpapan melalui UPTD PPA yang berada dibawah DP3AKB berusaha untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan baik. Dalam proses penanganan kekerasan, UPTD PPA mengalami beberapa kendala seperti beragamnya kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga memiliki penanganan yang berbeda-beda pula, sehingga UPTD PPA harus berkoordinasi dengan UPTD PPA di daerah lain atau dengan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang telah menghadapi kasus serupa sehingga UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan dapat menyelesaikan kasus kekerasan yang kompleks tersebut dengan baik. UPTD PPA tidak jarang menemui kendala dalam pengumpulan bukti kekerasan yang terjadi. Kekerasan fisik dan kekerasan seksual dapat dibuktikan dengan visum, namun terdapat kendala jika hasil konseling tidak sesuai dengan hasil visum. UPTD PPA berkoordinasi dengan kepolisian dalam pencarian bukti. Kekerasan psikis adalah salah satu jenis kasus yang tidak jarang mengalami kendala dalam pengumpulan bukti. UPTD PPA memberikan arahan kepada korban bahwa sebisa mungkin merekam segala bentuk kekerasan yang dapat berdampak negatif pada kondisi psikis seseorang seperti menyumpah, mengancam, berteriak, melecehkan, dan sebagainya, namun hal tersebut sulit dilakukan oleh korban yang merasa ketakutan. Strategi UPTD PPA dalam menangani kendala pengumpulan bukti adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan,

rumah sakit, dan lain-lain. UPTD PPA akan membantu mencari saksi-saksi yang berkaitan dengan suatu kasus.

“Biasanya pemenuhan bukti agak sulit. Jarang ada saksi kekerasan, sehingga kami akan menitik beratkan pada hasil visum atau hasil konseling, namun akan menjadi masalah jika hasil konseling tidak sesuai dengan yang disampaikan korban. Kami harus cari dengan berbagai macam cara, jika minim bukti kami tidak bisa apa-apa, karena kamu tidak mungkin memasukan terduga tersangka jika tidak ada bukti yang kuat. Misal kepolisian minta untuk mendatangkan saksi maka kami akan bantu untuk mendatangkan saksi yang diminta pihak kepolisian.” (Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 3 Februari 2021)

Dampak negatif dari kekerasan yang dapat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korban diantaranya adalah trauma, menarik diri dari aktivitas sosial, merasa tidak berharga sehingga ingi mengakhiri hidup. Dalam proses penanganan kasus kekerasan perempuan, pemerintah memerlukan strategi agar kasus kekerasan yang ditangani dapat terselesaikan dengan baik serta meminimalisir efek negatif di kemudian hari. UPTD PPA akan mendampingi korban-korban kekerasan mulai dari korban melapor hingga kasus selesai. UPTD PPA telah memiliki tenaga psikolog yang dapat membantu memulihkan keadaan psikis korban pasca mengalami kekerasan, selain itu UPTD PPA juga memberikan beberapa layanan seperti pemberdayaan ekonomi. UPTD PPA bahkan dapat melakukan penjangkauan dengan mendatangi korban jika korban memiliki kesulitan untuk datang di UPTD PPA.

Menurut Moenir (Sellang, 2016:80) terdapat enam faktor pendukung pelayanan publik. Pertama, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pegawai.

Pegawai di UPTD PPA berkerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PPA pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Tahun 2019. Kedua, faktor sarana dalam

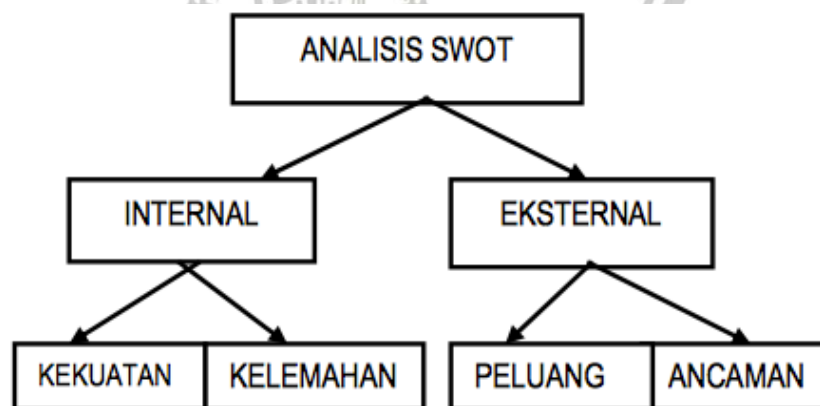
pelaksanaan tugas pelayanan. UPTD PPA Kota Balikpapan mendapat dukungan berupa penyediaan fasilitas seperti salah satunya gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Ketiga, faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan publik. Pejabat dan petugas di UPTD PPA memiliki kesadaran untuk melayani sehingga UPTD PPA memberikan pendampingan kepada korban dari awal kasus dilaporkan hingga kasus selesai dan berusaha untuk menemukan solusi di setiap kendala yang dihadapi. Keempat, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan minimum. Kelima, faktor ketrampilan, namun UPTD PPA memiliki keterbatasan dalam menangani setiap kasus kekerasan yang kompleks dan beragam sehingga UPTD PPA Kota Balikpapan menyiasati dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar kasus kekerasan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Keenam, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan publik. Kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang kompleks.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT. Menurut Wardoyo (2011: 1) analisis SWOT adalah analisis yang digunakan oleh *strategic planner* dalam proses pengambilan keputusan strategis. Analisis SWOT memberikan perhatian pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Menurut Hendrawan (Kumara, 2018: 68-69) SWOT merupakan analisis situasi dan kondisi yang memiliki sifat deskriptif dimana analisis tersebut

menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan dan kemudian dikelompokkan menjadi empat komponen dasar sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*) adalah situasi di dalam suatu organisasi tertentu yang menjadi kekuatan bagi organisasi tersebut. Salah satu contoh dari kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, dan lain-lain.
2. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi di dalam suatu organisasi tertentu yang menjadi kelemahan bagi organisasi tersebut.
3. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi di luar suatu organisasi tertentu yang dapat menjadi peluang bagi organisasi tersebut untuk berkembang.
4. Tantangan (*Threat*) adalah situasi di luar suatu organisasi tertentu yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal, sedangkan peluang dan tantangan adalah faktor eksternal.



Gambar 4.6 Pola Pikir Analisis Swot

Sumber: Wardoyo (2011: 1)

Tujuan akhir dari dilakukannya analisis SWOT adalah untuk menghasilkan beberapa alternatif strategi.

Peneliti berhasil mewawancarai Ibu Esti Santi Pratiwi selaku Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada hari Senin, 14 Desember 2020, maka diperoleh informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada UPTD PPA sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki UPTD PPA adalah organisasi tersebut adalah milik pemerintah dan dinaungi oleh DP3AKB Kota Balikpapan, sehingga UPTD PPA memiliki dasar hukum mengenai pembentukan UPTD PPA Kota Balikpapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan. Pelayanan yang diberikan UPTD PPA tidak dipungut biaya karena organisasi tersebut milik pemerintah. UPTD PPA dibawah naungan DP3AKB Kota Balikpapan menjadikan UPTD PPA lebih mudah untuk berkoordinasi antar organisasi pemerintah.

“UPTD PPA adalah lembaga milik pemerintah, semua layanannya gratis. Koordinasi antar OPD lebih mudah, contohnya saya ingin berkoordinasi dengan DKK akan lebih mudah.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

Selain itu, UPTD PPA juga telah memiliki SDM yang memadai. Sebagai contoh UPTD PPA Kota Balikpapan telah memiliki psikolog klinis yang dapat mendampingi perempuan yang menjadi korban kekerasan tanpa dipungut biaya. Tidak semua UPTD PPA di seluruh kota maupun kabupaten memiliki psikolog klinis, bahkan tidak semua kabupaten atau kota yang telah memiliki UPTD PPA. Ketersediaan SDM yang memadai di UPTD PPA Kota Balikpapan menjadikan UPTD PPA lebih mudah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi korban kekerasan di Kota Balikpapan.

“SDM yang dibutuhkan dipenuhi oleh pemerintah, sebagai contoh kami sudah memiliki Psikolog Klinis.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

UPTD PPA Kota Balikpapan baru berdiri pada tahun 2019. Kasus-kasus kekerasan yang ditangani beragam. Kelemahan dari UPTD PPA Kota Balikpapan adalah jenis kasus yang ditangani belum terlalu banyak sehingga ketika mendapatkan kasus kekerasan yang baru, UPTD PPA Kota Balikpapan belum memahami mengenai kasus jenis baru tersebut.

“kami kurang pengalaman karena kasus kekerasan sangat bermacam-macam dan unik, namun kami bisa bertanya dengan ketua-ketua sebelumnya P2TP2A” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

Kelemahan lainnya dari UPTD PPA Kota Balikpapan adalah belum adanya *website* kusus yang dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai UPTD PPA Kota Balikpapan, selain itu

karena belum adanya *website* maka masyarakat sulit untuk mengetahui adanya UPTD PPA sebagai lembaga yang bertugas untuk menangani kekerasan. UPTD PPA telah memiliki *instagram*, namun belum digunakan secara maksimal.

3. Peluang (*Opportunity*)

UPTD PPA Kota Balikpapan mendapat dukungan kuat dari DP3AKB Kota Balikpapan seperti pengadaan sarana dan prasarana serta dana yang memenuhi untuk UPTD PPA Kota Balikpapan. DP3AKB Kota Balikpapan senantiasa membantu UPTD PPA jika mengalami kesulitan dalam menghadapi jenis kasus baru dengan membantu mencari orang yang berpengalaman dalam menangani kasus tersebut. Pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang mendukung kepada UPTD PPA seperti gedung khusus UPTD PPA, selain itu UPTD PPA juga mendapatkan dana yang cukup dari pemerintah.

“pemerintah sudah mendukung dibentuknya UPTD. Jika kami memiliki permasalahan, mereka bisa membantu menyelesaikan. Pemerintah memberikan dana, gedung, sarana dan prasarana, SDM yang dibutuhkan dipenuhi oleh pemerintah.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

4. Ancaman (*Threat*)

UPTD PPA Kota Balikpapan memiliki ancaman berupa banyaknya jenis kasus kekerasan yang akan terus berkembang seperti contohnya adalah penyebaran video pribadi yang dialami salah satu korban yang melapor pada UPTD PPA Kota Balikpapan dan kasus tersebut dimasukkan pada

jenis kasus lain-lain. Jenis-jenis kasus kekerasan akan terus berkembang setiap harinya, sehingga hal tersebut menjadi ancaman bagi UPTD PPA.

“tantangan bagi kami adalah dapat menangani semua kasus kekerasan di Balikpapan dengan baik, walaupun berat tapi hal tersebut telah menjadi tugas kami. Beragam kasus kekerasan yang unik juga menjadi tantangan bagi kami.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 14 Desember 2020)

	<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>
	1) Ketersedian SDM yang cukup 2) Mudah berkoordinasi antar sesama organisasi pemerintah	1) Kurang berpengalaman dalam beberapa jenis kasus kekerasan perempuan 2) Belum memiliki <i>website</i> khusus yang dapat diakses oleh masyarakat dan belum memanfaatkan media sosial dengan maksimal
<i>Opportunities</i>	a) Mengadakan pelatihan <i>skill training</i> untuk SDM yang ada dengan memanfaatkan	a) Mengajukan permohonan kepada pemerintah agar diadakan studi banding ke beberapa UPTD PPA
1) Dukungan dana, sarana dan prasarana		

dari pemerintah Kota Balikpapan, serta dukungan dari organisasi pemerintah lainnya	dukungan dana dari pemerintah. b) Terus berkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait karena proses koordinasi antar organisasi pemerintah cenderung lebih mudah dan dukungan dari organisasi pemerintah lainnya yang memudahkan UPTD PPA jika ingin melakukan koordinasi.	daerah lainnya guna untuk menambah wawasan mengenai jenis kasus yang beragam dan cara menanganinya. b) Mengajukan permohonan penambahan SDM yang ahli dibidang teknologi dan informasi guna untuk membangun website dan mengembangkan aplikasi maupun media sosial yang telah ada.
Threats	a) Berkoordinasi dengan OPD terkait perlindungan perempuan seperti PUSPAGA untuk terus update mengenai jenis-jenis	b) Terus menambah wawasan mengenai jenis-jenis kasus kekerasan dan cara menanganinya dengar berkoordinasi dengan berbagai organisasi
1) Berbagai jenis kasus kekerasan perempuan yang terus berkembang		

	kasus kekerasan yang terus berkembang.	maupun lembaga yang menangani kasus kekerasan baik di dalam daerah maupun di luar daerah.
--	--	---

Tabel 4.2 Matrik SWOT UPTD PPA Kota Balikpapan

Terdapat empat alternatif strategi yang diperoleh dari matrik SWOT diatas yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Strategi *SO (Strengths - Opportunities)* yang diperoleh dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada. Terdapat dua bentuk strategi yang dapat digunakan oleh UPTD PPA. Pertama, mengadakan pelatihan untuk SDM yang sudah ada dengan memanfaatkan dukungan pemerintah seperti penyediaan fasilitas untuk mengadakan pelatihan dan penyediaan narasumber yang kompeten dibidang penanganan kasus kekerasan khususnya perempuan dewasa. Kedua, terus melakukan berkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait karena proses koordinasi antar organisasi pemerintah cenderung lebih mudah dan dukungan dari organisasi pemerintah lainnya yang memudahkan UPTD PPA jika ingin melakukan koordinasi.
2. Strategi *ST (Strengths – Threats)* yang diperoleh dengan menggunakan faktor internal yaitu kekuatan untuk mengurangi atau bahkan menghindari dampak dari berbagai ancaman. Strategi yang dapat digunakan oleh UPTD

PPA adalah melakukan koordinasi dengan OPD terkait perlindungan perempuan seperti PUSPAGA dan organisasi terkait lainnya untuk terus *update* mengenai jenis-jenis kasus kekerasan yang terus berkembang, sehingga ketika ada kasus kekerasan baru yang sebelumnya belum pernah ditangani, UPTD PPA setidaknya sudah memiliki gambaran tentang kasus tersebut dan mengetahui bagaimana harus menanganinya.

3. Strategi *WO (Weaknesses – Opportunities)* yang diperoleh dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir kelemahan. Terdapat dua strategi yang dapat digunakan oleh UPTD PPA. Pertama, mengajukan permohonan kepada pemerintah agar diadakan studi banding ke beberapa UPTD PPA daerah lainnya guna untuk menambah wawasan mengenai jenis kasus yang beragam dan cara menanganinya. Setiap UPTD PPA di berbagai daerah pasti menghadapi jenis kasus kekerasan yang berbeda-beda, oleh sebab itu studi banding diperlukan agar masing-masing UPTD PPA di berbagai pengalaman satu sama lain. Kedua, mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menyediakan SDM yang ahli dibidang teknologi dan informasi guna untuk membangun *website* khusus UPTD PPA Kota Balikpapan, serta untuk mengembangkan aplikasi maupun media sosial yang telah ada.

4. Strategi *WT (Weaknesses – Threats)* yang diperoleh dengan mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi ini bersifat *defensive*. Strategi yang dapat digunakan oleh UPTD PPA adalah terus berusaha menambah wawasan mengenai jenis-jenis kasus kekerasan dan cara

menanganinya dengan berbagai cara salah satunya adalah berkoordinasi dengan berbagai organisasi maupun lembaga yang menangani kasus kekerasan baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Peneliti mewawancarai Ibu Esti Santi Pratiwi selaku Kepala UPTD PPA

Kota Balikpapan mengenai koordinasi yang dilakukan oleh UPTD PPA.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada hari Kamis, 1 Juli 2021, maka diperoleh informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada strategi yang dilakukan oleh UPTD PPA sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan dari strategi yang dilakukan oleh UPTD PPA dengan institusi-institusi lainnya adalah penanganan kasus kekerasan menjadi lebih cepat.

“kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, POLRES, POLDA, BAPAS, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Koordinasi membuat penanganan kekerasna menjadi lebih cepat.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 1 Juli 2021)

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan dari strategi yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah koordinasi menuntut agar SDM yang terlibat memiliki kemampuan maupun pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan, sementara SDM yang ada memiliki kemampuan yang berbeda dan beberapa tidak memiliki pengalaman.

“kemampuan SDM yang baru belum memiliki pengalaman, hanya itu saja saya pikir itu lumrah.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 1 Juli 2021)

3. Peluang (*Opportunity*)

Adanya distorsi antar instansi-instansi pemerintah membuat proses koordinasi menjadi lebih mudah. UPTD PPA tidak perlu menunggu proses administrasi selesai lalu dapat melakukan koordinasi, namun proses administrasi dapat beriringan dengan koordinasi.

“tidak perlu menunggu surat di acc, kami sudah bisa melakukan koordinasi, jadi sambil menunggu proses administrasi, kami juga sambil melakukan koordinasi mengenai masalah penanganan kekerasan.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 1 Juli 2021)

4. Tantangan (*Threat*)

Tantangan dalam strategi ini adalah pergantian personil, sehingga SDM baru tersebut masih kurang pengalaman dan pemahaman.

“terkadang ada pergantian personil di dinas atau OPD yang sering kita ajak koordinasi sehingga masih ada yang kurang berpengalaman.” (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Balikpapan di UPTD PPA Kota Balikpapan, tanggal 1 Juli 2021)

	<i>Strenght</i>	<i>Weakness</i>
	Penanganan kasus kekerasan menjadi lebih cepat	Memerlukan SDM yang memiliki pemahaman yang sama mengenai kasus kekerasan
<i>Opportunity</i>	Berkerjasama dengan seluruh instansi pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kekerasan	Mengarahkan SDM yang telah berpengalaman untuk membantu membimbing SDM baru
Distorsi antar instansi yang		

meudahkan koordinasi	sehingga semua kasus dapat diselesaikan dengan baik dan cepat	
Threat		
Adanya pergantian personi dan SDM baru belum memiliki pengalaman	Membuat alur kerja yang disepakati bersama instansi terkait sehingga jika terjadi pergantian SDM maka SDM baru hanya perlu mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan	Mengadakan pelatihan <i>skill training</i> dalam menangani kasus kekerasan pada calon SDM baru

Tabel 4.3 Matrik SWOT Strategi UPTD PPA

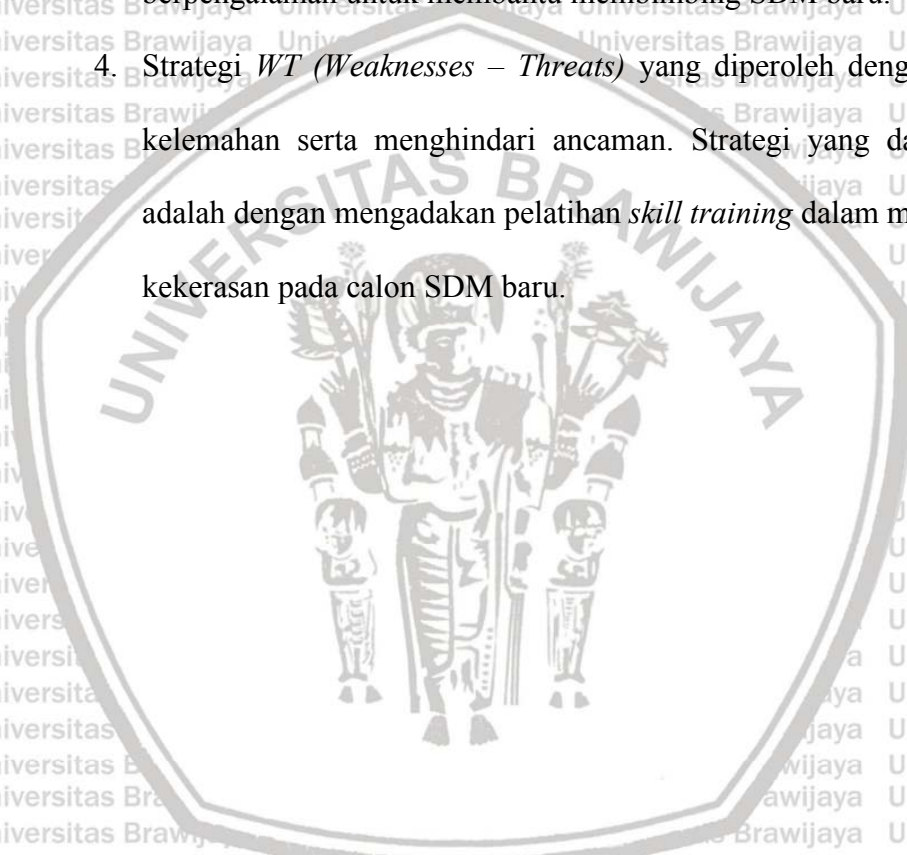
Terdapat empat alternatif strategi yang diperoleh dari matrik SWOT diatas yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Strategi *SO (Strengths - Opportunities)* yang diperoleh dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan berkerjasama dengan seluruh instansi pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kekerasan sehingga semua kasus dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.
2. Strategi *ST (Strengths - Threats)* yang diperoleh dengan menggunakan faktor internal yaitu kekuatan untuk mengurangi atau bahkan menghindari dampak dari berbagai ancaman. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan membuat alur kerja yang disepakati bersama instansi terkait

sehingga jika terjadi pergantian SDM maka SDM baru hanya perlu mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan.

3. Strategi *WO (Weaknesses – Opportunities)* yang diperoleh dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir kelemahan. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan mengarahkan SDM yang telah berpengalaman untuk membantu membimbing SDM baru.

4. Strategi *WT (Weaknesses – Threats)* yang diperoleh dengan mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan pelatihan *skill training* dalam menangani kasus kekerasan pada calon SDM baru.



BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan di UPTD PPA Kota Balikpapan terdiri dari:

1. UPTD PPA terlebih dahulu akan melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban;
2. Korban akan diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan / rehabilitasi sosial/ bantuan hukum sesuai dengan hasil identifikasi;
3. Korban akan dipulangkan dan akan dilakukan pendataan kembali.
4. Setelah korban dipulangkan, UPTD PPA dapat membantu korban dalam penyesuaian diri seperti salah satu contohnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Peningkatan kasus mungkin saja bukanlah sesuatu yang buruk jika peningkatan kasus yang tercatat di Kota Balikpapan karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan baik yang dialami sendiri ataupun yang dilihat. Jika hal tersebut benar, maka DP3AKB berhasil mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Sebaliknya, penurunan kasus kekerasan mungkin saja bukanlah sesuatu yang baik jika tidak diiringi dengan penurunan kesadaran masyarakat untuk

melaporkan kasus kekerasan yang dialami sendiri atau yang dilihat. Hal yang terpenting adalah semua kasus kekerasan yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Balikpapan dapat terselesaikan dengan baik.

Terdapat strategi yang dapat dilakukan oleh UPTD PPA Kota Balikpapan dalam menangani berbagai macam kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan. Koordinasi menjadi strategi yang digunakan oleh UPTD PPA. UPTD PPA berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan institusi lainnya. UPTD PPA sebagai organisasi milik pemerintah memudahkan UPTD PPA untuk berkoordinasi dengan organisasi pemerintah lainnya. Koordinasi mempercepat penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Balikpapan.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka saran yang dapat diberikan peneliti agar penanganan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Balikpapan dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *skill training* mengenai penanganan kasus kekerasan,
2. Berkoordinasi dengan OPD terkait perlindungan perempuan seperti PUSPAGA dan organisasi non-pemerintah terkait lainnya untuk terus *update* mengenai jenis-jenis kasus kekerasan yang terus berkembang;

3. Mengadakan studi banding ke beberapa UPTD PPA daerah lainnya dan berbagai organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan guna untuk menambah wawasan mengenai jenis kasus yang beragam dan cara menanganinya;
4. Mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menyediakan SDM yang ahli di bidang teknologi dan informasi guna untuk membangun *website* khusus UPTD PPA Kota Balikpapan, serta untuk mengembangkan aplikasi maupun media sosial yang telah ada;
5. Mengajukan kepada pemerintah untuk menambahkan Seksi PPA pada setiap RT di Kota Balikpapan serta mengaktifkannya;
6. Memasang poster maupun baliho yang berisikan mengenai apa saja yang harus dilakukan perempuan ketika mendapatkan kekerasan di tempat-tempat strategis.
7. Memiliki format pasti untuk mencatat jumlah klien maupun kasus yang dilaporkan di UPTD PPA sehingga jumlah klien dan jumlah kasus dapat tercatat dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, & Ritmon Amala. (2016). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mogodow Utara*. Gorontalo: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
- Amalia, Mia. (2011). *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Cianjur: Universitas Suryakencana.
- Andriani, Helmina, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Jumari Ustiawaty, Ria Rahmatul Istiqomah, dan Roushandy Asri Fardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Anggara, Sahya & Ii Sumantri. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Avenzora, Ahmad, Ali Said, Aprilia Ira Pratiwi, Henry Asri Reagan, Indah Budiati, Nia Setiyawati, Putri Larasaty, Riyadi, Sofaria Ayuni, Yuni Susianto. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Aziz, Nana Abdul. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Implementasi*. (2019). Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Bawono, Ick Rangga. (2018). *Manajemen Strategik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Bovaird, Tony & Elke Loffler. *Public Management and Government*. Canda: Routledge
- Chaniago, Siti Aminah. (2014). *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Dewi, Kenny. (2017). *Manajemen Strategik pada Organisasi Sektor Publik*. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Hakim, Abdul, Muhammad Shobaruddin, dan Rizky Hersya Pratama. (2015). *Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Infoemasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW)*. Malang: Universitas Brawijaya

Hasanah, Hasyim. (2013). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*. Semarang: IAIN Walisongo.

Johnny, Ruby Hadiarti. (2010). *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Kahar, Fakhri. (2010). *Implementasi Keputusan Strategik (Suatu Studi di Universitas Negeri Makassar)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Kasmira. (2020). *Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kumara, Dedek. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan*. Tangerang: Universitas Pamulang.

Kurniawan, Robi Cahyadi. (2016). *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*. Lampung: Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Lestari, Indri & Wahyuni. (2018). *Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar dalam Novel Room Karya Emma Donoghue*. Balikpapan: Universitas Balikpapan.

Mobalen, Kilyon N. (2013). *Manajemen Strategis pada Pengelolaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Octalina, Benedicta Desca Prita. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Oja, Hubertus. (2016). *Penerapan Manajemen Strategi dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik*. Merauke: Universitas Musamus.

Pemerintah Kota Balikpapan. 1 Desember 2020

www.balikpapan.go.id

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/m. PAM/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikologis Klinis dan Angka Kreditnya.

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, dan catatan kasus kekerasan di Kota Balikpapan yang tercatat oleh UPTD PPA.

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

Salim dan Syahrudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipustaka Media.

Sellang, Kamaruddin. (2016). *Administrasi dan Pelayanan publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Penerbit Ombak: Yogyakarta.

Siyoto, Sandu & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wardoyo, Paulus. *Alat Analisis Manajemen*. Semarang: Semarang University Press

Yulianti, Devi. (2018). *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Pusaka Media: Bandarlampung.

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara I

Informan

Tanggal Wawancara : 14 Desember 2020

Tempat : UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Identitas Informan

1. Nama : Ibu Esti Santi Pratiwi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Kepala UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Hasil Wawancara

1. Apa perbedaan jumlah kasus dan jumlah klien ?

Jawab:

Satu klien dapat mengalami dua kasus, misalnya kekerasan seksual namun juga ada kekerasan psikis. Satu klien dapat mengalami beberapa kasus.

2. Apa yang dimaksud dengan jenis kasus EE ?

Jawab:

EE adalah eksploitasi ekonomi.

3. Apakah anak-anak yang berjualan termasuk eksploitasi ekonomi ?

Jawab:

Iya, namun hal tersebut hal dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Anak tersebut akan di asesmen yaitu kami akan bertanya mengapa dia berjualan, jika orangtua anak tersebut tidak mampu maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial

apakah orang tersebut dapat didaftarkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, jika sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah maka akan kita cari tahu mengenai masalah lainnya.

4. Apa saja contoh dari eksploitasi ekonomi ?

Jawab:

Contohnya adalah anak-anak yang disuruh untuk berjualan, intinya adalah anak tersebut digunakan untuk menghasilkan uang. Kebanyakan bentuknya adalah anak-anak berjualan, seperti berjualan kerupuk, berjualan kue di lampu merah. Namun rata-rata anak-anak tersebut berjualan karena keinginannya sendiri, karena ingin mendapatkan uang jajan. Oleh karena itu, akan kami asesmen.

5. Jika anak-anak berjualan dengan kemauannya sendiri apakah termasuk eksploitasi ekonomi ?

Jawab:

Tetap eksploitasi ekonomi karena belum waktunya untuk mencari penghasilan karena hal tersebut adalah kewajiban orangtua. Oleh karena itu, akan kami lakukan asesmen untuk mengetahui kondisi orangtua, jika tergolong tidak mampu maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial apakah keluarga tersebut dapat mendapatkan bantuan Keluarga Harapan, namun jika tidak memenuhi kriteria maka kira-kira dapat mendapatkan program bantuan apa.

6. Apa saja yang termasuk kasus dll ?

Jawab:

Kasus yang selain kasus yang telah disebutkan pada tabel. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu unik, sehingga kasus kekerasan selain yang telah disebutkan di tabel maka akan masuk ke jenis kasus dll.

7. Contoh kasus dll seperti apa ?

Jawab:

contohnya adalah *bullying*, penyebaran video pribadi, dan lain-lain.

8. UPTD PPA yang dinaungi DP3AKB dibentuk khusus untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Apa saja strategi UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan ?

Jawab:

Sebelumnya terdapat P2TP2A yaitu lembaga masyarakat dan bukan milik pemerintah langsung, namun dengan banyaknya kasus pemerintah memandang bahwa pemerintah perlu untuk memiliki lembaga sendiri sehingga koordinasinya lebih mudah. Berdirinya UPTD merupakan salah satu bentuk strategi pemerintah sehingga koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan menjadi lebih mudah. Koordinasi yang dilakukan antar OPD akan lebih mudah. Salah satu bentuk strategi pemerintah seperti itu.

9. UPTD PPA memiliki aplikasi Lapor Pak untuk memudahkan masyarakat melaporkan tindak kekerasan, apakah ada inovasi selain aplikasi tersebut ?

Jawab:

Kami memiliki *Hotline*, namun hotline tersebut korban tidak memiliki ruang khusus untuk berbicara langsung dengan psikolog. Aplikasi Lapor Pak dibuat untuk melebarkan sayap, dengan harapan korban dapat memiliki ruang khusus untuk

berbicara dengan psikolog, dan jika terjadi kekerasan diharapkan dapat menolong korban, minimal bisa menenangkan dirinya. Pada *Hotline* WA korban dapat menelfon maupun *video call*. Namun pada aplikasi Lapor Pak, psikolog kita memegang hp sendiri sehingga bisa terhubung langsung dengan korban, untuk kedepannya kami merencanakan konselor hukum juga seperti itu, namun hal tersebut masih dalam proses, sehingga masyarakat dapat berkonsultasi mengenai hukum, untuk kedepannya kami akan menambah *fitur* di aplikasi Lapor Pak dengan konseling hukum. Aplikasi tersebut bisa digunakan diluar jam kerja, karena pada jam kerja merka yang ingin berkonsultasi dapat datang langsung ke UPTD PPA, namun diluar jam kerja atau saat libur dapat berkonsultasi melalui aplikasi tersebut.

10. Pada kenyataannya korban kekerasan tidak berani untuk melapor, apakah ada strategi UPTD PPA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan ?

Jawab:

Hal tersebut bukan kapasitas kami, hal tersebut merupakan ranah DP3AKB. Hal tersebut merupakan edukasi atau sosiali terhadap masyarakat merupakan ranah Dinas. Kedua hal tersebut sudah dilakukan dan sudah sering dilakukan mulai dari tingkat sekolah, pkk, posyandu, dan lain-lain. DP3AKB sering memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki UPTD PPA dan mensosialisasikan mengenai UPTD, dan memberikan informasi kepada masyarakat kemana harus melapor jika mendapat kekerasan. Pemerintah Daerah juga mencanangkan bahwa setiap RT di Kota Balikpapan dapat menambahkan satu seksi yaitu Seksi PPA. PPA RT merupakan perpanjangan tangan pemerintah jika terjadi kekerasan. Seperti

contoh kekerasan seksual yang kerap dianggap aib, maka kami harus menyadarkan jika mengetahui hal tersebut, karena jika hanya melindungi aib, pelaku akan berkeliaran dan dapat melakukan hal serupa. Kami akan menyadarkan keluarganya dan mendorong keluarga korban untuk melaporkan agar si pelaku berhenti dan korban mendapatkan penanganan. Sehingga untuk pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi adalah ranah DP3AKB, dan UPTD menangani kasus yang telah terjadi. Waktu saya masih berkerja di Dinas, saya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan juga melalui forum anak baik tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Selain itu juga Dinas juga telah mengedukasi masyarakat melalui media sosial dan radio. Pada radio KPFM sering diinformasikan seperti bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh, menginformasikan letak UPTD PPA, dan apa saja tugas UPTD.

11. Bagaimana alur penyelesaian kasus kekerasan ?

Jawab:

Alur penyelesaian kasus kekerasan dapat dilihat di spanduk yang terdapat pada UPTD PPA.

12. Jika saya menyaksikan kekerasan dan saya melapor ke UPTD, namun pihak korban tidak mau untuk ditangani, maka solusinya seperti apa ?

Jawab:

Jika kasus kekerasan anak harus diproses. Namun jika perempuan dewasa akan kita coba dampingi dan dibujuk agar korban mau melapor. Jika kasus kekerasan anak adalah delik murni sehingga laporan tidak dapat dicabut, berbeda dengan kekerasan perempuan dewasa yang sewaktu-waktu dapat dicabut.

13. Apa kelebihan UPTD PPA ?

Jawab:

UPTD PPA adalah lembaga milik pemerintah, semua layanannya gratis.

Koordinasi antar OPD lebih mudah, contohnya saya ingin berkoordinasi dengan

DKK akan lebih mudah.

14. Apa kekurangan UPTD PPA ?

Jawab:

Kami kurang pengalaman karena kasus kekerasan sangat bermacam-macam dan unik, namun kami bisa bertanya dengan ketua-ketua sebelumnya P2TP2A. Namun kami sudah berusaha dengan maksimal.

15. Apa saja yang menjadi *support* untuk UPTD PPA ?

Jawab:

Pemerintah sudah mendukung dibentuknya UPTD. Jika kami memiliki permasalahan, mereka bisa membantu menyelesaikan. Pemerintah memberikan dana, gedung, sarana dan prasarana, SDM yang dibutuhkan dipenuhi oleh pemerintah. Di beberapa daerah ada UPTD yang hanya memiliki 2 SDM yaitu Kepala UPTD dan Kasubag, serta masih menyewa psikolog klinis sehingga hal tersebut berarti mereka kekurangan SDM. Kami sudah memiliki psikolog klinis.

Pemerintah kota kita sangat *aware* bagaimana penanganan kekerasan perempuan dan anak maka kami *disupport* dana, gedung. Tidak semua UPTD PPA kabupaten/kota yang memiliki gedung, ada UPTD yang masih bergabung dengan dinas, bahkan ada kabupaten/kota yang tidak membentuk UPTD PPA.

16. Apa saja tantangan UPTD PPA ?

Jawab:

Tantangan bagi kami adalah dapat menangani semua kasus kekerasan di

Balikpapan dengan baik, walaupun berat tapi hal tersebut telah menjadi tugas kami.

Beragam kasus kekerasan yang unik juga menjadi tantangan bagi kami. Jika orang

banyak melapor bukan berarti banyak permasalahan, namun berarti masyarakat

sudah mulai berani karena adanya sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat

lebih terbuka, Orang sedikit melapor, bukan berarti kasusnya sedikit. Banyak

tidaknya laporan bukan patokan banyak atau tidaknya kasus kekerasan, mungkin

saja laporan sedikit karena masyarakat takut untuk melapor, atau semua kasus

memang sudah dilaporkan. Tidak usah takut dengan kasus yang banyak karena

mungkin masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk melapor. Hal yang penting

adalah bagaiman kasus yang dilaporkan dapat ditangani dengan baik. Jika banyak

masyarakat yang berani untuk melapor maka hal tersebut adalah keberhasilan

DP3AKB yang telah mengedukasi masyarakat. Kasus kekerasan walaupun sudah

setahun yang lalu tetap bisa dilaporkan jika masih ada buktinya.

17. Apakah UPTD PPA menjalin kerjasama dengan organisasi non-pemerintah

dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan ?

Jawab:

Sampai saat ini belum ada, dan belum ada organisasi atau LSM non pemerintah

yang membantu dalam penanganan kasus kekerasan perempuan.

Transkrip Wawancara II

Informan

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2021

Tempat : UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Identitas Informan

1. Nama : Ibu Esti Santi Pratiwi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Kepala UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Hasil Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan korban rujukan ?

Jawab:

Korban rujukan seperti contohnya yang berasal dari Polres, korban melaporkan bisa saja ke Polsek, atau Polres, atau PUSPAGA. Sehingga dapat dikatakan korban pertama kali melapor tidak ke UPTD PPA, lalu diarahkan di UPTD PPA.

2. Apa yang dimaksud dengan korban penjangkauan ?

Jawab:

Misalnya kami mendapat informasi bahwa ada korban kekerasan di daerah x dan korban tidak dapat datang ke UPTD PPA, maka kami jangkau kami datang atau misal korban punya jadwal konseling namun korban tidak bisa datang ke UPTD PPA, maka kami akan datang ke rumah korban. Hal tersebut disebut penjangkauan.

3. Jika sudah dilakukan penjangkauan, namun korban tidak bersedia dibantu maka seperti apa ?

Jawab:

Pertama kami akan mendatangi pelapor, lalu kami minta untuk didampingi pelapor untuk mendatangi korban. Jika memang kasusnya menyangkut kekerasan anak maka kami yang akan melaporkan jika keluarga tidak mau melaporkan. Kekerasan anak harus dilaporkan dan diproses

4. Apa yang dimaksud dengan tahap pengaduan identifikasi ?

Jawab:

Kita akan mengasesmen klien yang datang, hal tersebut merupakan identifikasi, kami melihat tersebut apakah butuh ke tahap konseling terlebih dahulu atau langsung dilanjutkan ke PPA Polres jika memang kami sudah mengerti kasus yang terjadi. Setelah diidentifikasi maka ditentukan langkah apa yang akan diambil.

5. Apa yang dimaksud dengan *screening* ?

Jawab:

Sama dengan asesmen yang ada pada tahap pengaduan identifikasi.

6. Apa yang dimaksud dengan tahap rencana intervensi ?

Jawab:

Ketika kami sudah tau apa permasalahannya dan prosesnya sudah berjalan, lalu intervensinya seperti apa ?, misalnya sudah kami tangani, korban sudah sampai ke PPA Polres dan sudah visum misalnya, dan intervensi kami apa ? bisa saja bentuk intervensi kita menanyakan ke PPA Polres mengenai keberlanjutan kasus tersebut, jika misal korban akan melakukan sidang lalu apa rencana kami berikutnya ? misalnya kami harus memanggil atau menjangkau klien untuk disiapkan pada waktu sidang, lalu jika sudah selesai sidang apa lagi rencana kami selanjutnya ?

misalnya kami akan berbicara dengan pihak keluarga korban menanyakan keadaan korban dan mengedukasi keluarga bagaimana keberlanjutannya. Sehingga rencana intervensi adalah rencana kedepannya.

7. Apa yang dimaksud pelayanan non-kritis ?

Jawab:

Non-kritis biasanya korban hanya berkonsultasi mengenai kasus yang dialami.

8. Apa yang dimaksud dengan pelayanan semi-kritis ?

Jawab:

Korban akan diberikan pelayanan semi-kritis jika mengalami luka fisik, misalnya klien yang diterima UGD dengan kondisi luka-luka, sehingga penanganannya tidak hanya dari kami.

9. Apa yang dimaksud dengan pelayanan medikolegal ?

Jawab:

Pelayanan yang dilakukan melalui medis seperti visum.

10. Apa yang dimaksud dengan kontrak sosial ?

Jawab:

Klien datang lalu di asesmen dan klien meminta bantuan sehingga klien bertanda tangan layaknya kontrak.

11. Apa yang dimaksud dengan konseling awal dan konseling lanjutan ?

Jawab:

Konseling awal adalah konseling pertama. Biasanya ketika klien datang pertama kali masih belum terbuka sehingga butuh konseling lanjutan.

12. Apa yang dimaksud dengan BAP ?

Jawab:

Berita Acara Pemeriksaan itu di kepolisian. Jadi polisi menanyakan kejadiannya lalu dibuat BAP. Penuntutan, putusan, restitusi adalah ranah kepolisian.

13. Apa yang menjadi kendala dalam alur penanganan ?

Jawab:

Biasanya pemenuhan bukti agak sulit. Jarang ada saksi kekerasan, sehingga kami akan menitik beratkan pada hasil visum atau hasil konseling, namun akan menjadi masalah jika hasil konseling tidak sesuai dengan yang disampaikan korban.

14. Strategi dalam menangani kendala tersebut seperti apa ?

Jawab:

Kami harus cari dengan berbagai macam cara, jika minim bukti kami tidak bisa apa-apa, karena kamu tidak mungkin memasukan terduga tersangka jika tidak ada bukti yang kuat. Misal kepolisian minta untuk mendatangkan saksi maka kami akan bantu untuk mendatangkan saksi yang diminta pihak kepolisian.

15. Apa strategi UPTD PPA agar kasus-kasus yang dilaporkan dapat terselesaikan dengan baik ?

Jawab:

Berkoordinasi, yaitu berkoordinasi dengan klien, berkoordinasi dengan penyidik. Kami tidak hanya melibatkan kepolisian saja namun juga melibatkan kejaksaan, kehakiman, dan banyak lagi.

Transkrip Wawancara III

Informan

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2021

Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan

Identitas Informan

1. Nama : Bapak Yohanes Maroko
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Pekerjaan : Pengacara dan Anggota LBH SIKAP

Hasil Wawancara

1. Berapa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang ditangani

LBH SIKAP ?

Jawab: 1 kasus dan baru tahun 2021 ini. LBH jarang sekali menangani kasus kekerasan karena kasus kekerasan baik KDRT maupun tidak biasanya hanya sampai ke kepolisian. Kedua belah pihak biasanya berdamai secara kekeluargaan di kepolisian dan jarang sampai ke meja hijau. LBH membantu kasus-kasus kekerasan yang sekiranya hukumannya akan diatas 5 tahun, sementara di korban ditampar atau kekerasan yang tidak terlalu serius maka hukumannya relatif rendah dibawah 1 tahun. Jika memang ada korban kekerasan yang didampingi itu secara personal dimana korban menyewa jasa pengacara. Sesuai amanat UU masyarakat tidak mampu dapat meminta surat keterangan tidak mampu dari RT hingga kelurahan dan lalu ditujukan ke LBH, maka LBH dapat membantu korban hingga selesai tanpa biaya apapun. Jadi seperti itu mengapa LBH jaranga menangani kasus kekerasan.

2. Apakah ada organisasi masyarakat yang membantu dalam penanganan kasus kekerasan ?

Jawab: sejauh saya belum ada, dan kasus-kasus kekerasan yang terjadi ditangani langsung oleh PPA.

Transkrip Wawancara IV

Informan

Tanggal Wawancara : 1 April 2021

Tempat : Via *Whatsapp*

Identitas Informan

1. Nama : Ibu Mei Christy
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Aktivist Perempuan Kota Balikpapan dan Anggota Solidaritas Dayak

Hasil Wawancara

1. Apakah Solidaritas Dayak pernah membantu korban kekerasan baik anak-anak maupun perempuan ?

Jawab: Solidaritas Dayak baru 1 kali membantu korban kekerasan yaitu ada 1 kasus di Kota Samarinda yang melibatkan tokoh dayak sebagai pelaku. Solidaritas dayak merupakan gabungan beberapa organisasi dayak dan organisasi masyarakat yang prihatin.

Transkrip Wawancara V

Informan

Tanggal Wawancara : 9 April 2021

Tempat : Via *Whatsapp*

Identitas Informan

1. Nama : Saudari Putri Imania
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Mahasiswa dan Humas Aliansi GERAKS

Hasil Wawancara

1. Apakah Aliansi Geraks sudah pernah membantu perempuan korban kekerasan ?

Jawab:

Belum, karena aliansi ini juga baru terbentuk setelah IWD 2021 (*International Women's Day*). Kami berencana untuk melanjutkan aliansi ini yang diharapkan dapat melindungi perempuan korban kekerasan, namun masih terkendala dengan urusan internal Aliansi GERAKS. Dalam aliansi ini belum ada pemahaman konteks.

Transkrip Wawancara VI

Informan

Tanggal Wawancara : 19 Mei 2021
Tempat : UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Identitas Informan

1. Nama : Ibu Esti Santi Pratiwi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Kepala UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Hasil Wawancara

1. Bagaimana pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban kekerasan ?

Jawab:

Biasanya kami mendampingi korban di bidang kesehatan, hukum, dan psikologisnya, lalu kami juga memberikan perlindungan. Jika misalnya korban sudah divisum, tapi kami takut pelaku menularkan virus atau penyakit bawaan kepada korban, maka akan kami lanjutkan ke obgin (dokter spesialis obstetri dan ginekologi), lalu kami juga akan peiksakan korban ke dokter spesialis kult dan kelamin untuk mengetahui apakah ada yang tertinggal dan jika ada akan dilanjutkan untuk perawatan. Kalau untuk pendampingan secara psikis, akan ada pendampingan dari psikolog sampai psikolog menyatakan cukup. Kalau untuk pendampingan hukum, saat korban lapor akan kami dampingi dan konselor hukum akan bertanya bagaimana perkembangan kasus kepada korban dan akan didampingi misalnya pada waktu sidang.

2. Apakah UPTD PPA juga memberikan pendampingan terhadap keluarga korban?

Jawab:

Untuk keluarga korban biasanya kami memberikan edukasi, jika korbannya anak kami akan mengedukasi orangtua dan nanti diharapkan orangtua akan mengedukasi anaknya, namun ada beberapa korban anak-anak yang menjadi korban karena kemauannya sendiri misalnya karena efek penggunaan *gadget*, nah kami akan edukasi orangtua. Jika hasil asesmen mengatakan bahwa anak tersebut kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari orangtuanya maka kami akan memberikan pendampingan kepada orangtua dengan mengedukasi orangtua. Jadi kamu berharap selain si korban sudah mendapatkan pendampingan psikolog dan orangtua tidak

diam saja. Namun jika korbannya perempuan dewasa biasanya akan kami berikan pendampingan di bidang kesehatan, jika memang ada trauma akan kami berikan pendampingan psikolog, namun jika korban adalah perempuan dewasa tidak ada pendampingan terhadap keluarga korban karena korban sudah bisa berfikir sendiri dan yang akan kami edukasi adalah si korban, jadi selain didampingi mungkin di bidang kesehatan maupun psikologis maupun hukum, kami juga mengedukasi si korban.

3. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan UPTD PPA terhadap korban kekerasan ?

Jawab:

Kami punya rumah perlindungan, kami juga memberikan perlindungan identitas terutama kepada anak sesuai dengan amanat undang-undang, semua identitas seperti nama, alamat, dan lainnya akan kami lindungi. Semua korban baik anak-anak maupun dewasa akan kami lindungi identitasnya terutama anak-anak, karena jika korban anak-anak memiliki masa depan yang lebih panjang dan efeknya akan bahaya jika identitasnya terungkap.

4. Selain perlindungan identitas dan rumah perlindungan apa ada lagi bentuk perlindungan yang diberikan ?

Jawab:

Itu saja sepertinya

5. Apakah UPTD PPA memberikan perlindungan terhadap keluarga korban ?

Jawab:

Tidak, karena yang utama adalah korban, namun kami pernah memberikan perlindungan kepada satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan 4 anak.

Keempat anak tersebut mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan psikis dari ayah mereka, dan sang ibu mendapatkan KDRT, lalu kami lindungi semua untuk meredam kemarahan sang ayah sebelum dilakukan mediasi, kami antar mereka ke rumah perlindungan dan lalu kami pertemukan sang ibu dan ayah lalu kita mediasi.

Lokasi rumah perlindungan kami rahasia.

Transkrip Wawancara VII

Informan

Tanggal Wawancara : 1 Juli 2021

Tempat : UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Identitas Informan

1. Nama : Ibu Esti Santi Pratiwi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Kepala UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Hasil Wawancara

1. Beberapa waktu lalu saya melakukan wawancara dengan ibu dan mendapatkan informasi bahwa UPTD PPA memiliki strategi yaitu koordinasi dalam menangani kekerasan, apakah ada strategi lain ?

Jawab:

Koordinasi yang dimaksud adalah misalnya ada anak yang memerlukan penanganan kesehatan maka kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas

Kesehatan, koordinasi yang kita lakukan luas seperti berkoordinasi dengan Balai

Pemasyarakatan. Sampai saat ini memang yang kita lakukan yaitu koordinasi. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, POLRES, POLDA, BAPAS, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Misalnya ada klien anak yang memerlukan pendidikan maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

2. Apakah kelebihan atau kekeutan dari koordinasi itu sendiri ?

Jawab:

Kita berada dibawah suatu dinas sehingga lebih mudah dalam berkoordinasi, koordinasi yang dilakukan menjadi lebih cepat, koordinasi mempercepat langkah dalam penanganan kekerasan.

3. Apakah kekurangan dari koordinasi ?

Jawab:

Terkadang ada pergantian personil di dinas atau OPD yang sering kita ajak koordinasi. Kemampuan SDM yang baru belum memiliki pengalaman, hanya itu saja saya pikir itu lumrah.

4. Apakah ada faktor eksternal yang mendukung jalannya koordinasi ?

Jawab:

Misalnya kita punya permasalahan, dengan adanya *support* membuat penanganan kasus menjadi lebih cepat. Tidak perlu menunggu surat di acc, kami sudah bisa melakukan koordinasi, jadi sambil menunggu proses administrasi, kami juga melakukan koordinasi mengenai masalah penanganan kekerasan.

5. Apakah ada faktor eksternal yang menghambat jalannya koordinasi ?

Jawab:

Sepertinya tidak ada, kami disini saya rasa cepat untuk memahami. Kami dasarnya memang baru didirikan, namun kemampuan kita untuk belajar tergolong cepat.

6. Apakah pelaku kekerasan merupakan tanggungjawab pihak kepolisian atau seperti apa ?

Jawab:

Kalau pelaku bukan ranah kita, pelaku merupakan ranah kepolisian, kecuali pelakunya anak maka akan kami beri pendampingan, tapi kalau pelaku dewasa merupakan ranah pihak berwajib.





Bersama Kepala UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



Pemantaun Klien yang Kasusnya Telah Selesai Oleh UPTD PPA

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



ASSESMEN DAN PSIKOTES KLIEN

Tahap Asesmen

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



PENDAMPINGAN BAP KLIEN ANAK DI POLDA KALTIM

Bantuan Hukum Oleh UPTD PPA

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



KONSELING PSIKOLOGIS

Bantuan Rehabilitasi Sosial

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



PENDAMPINGAN MEDIASI DI UPPA POLRES BALIKPAPAN

Proses Mediasi

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan Menerima Penghargaan sebagai

UPTD PPA Terbaik Ke-3 Tingkat Kabupaten Kota Seindonesia

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



Penandatanganan Prasasti UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



Prasasti UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan



Pintu Masuk Utama UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



Mobil Dinas UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



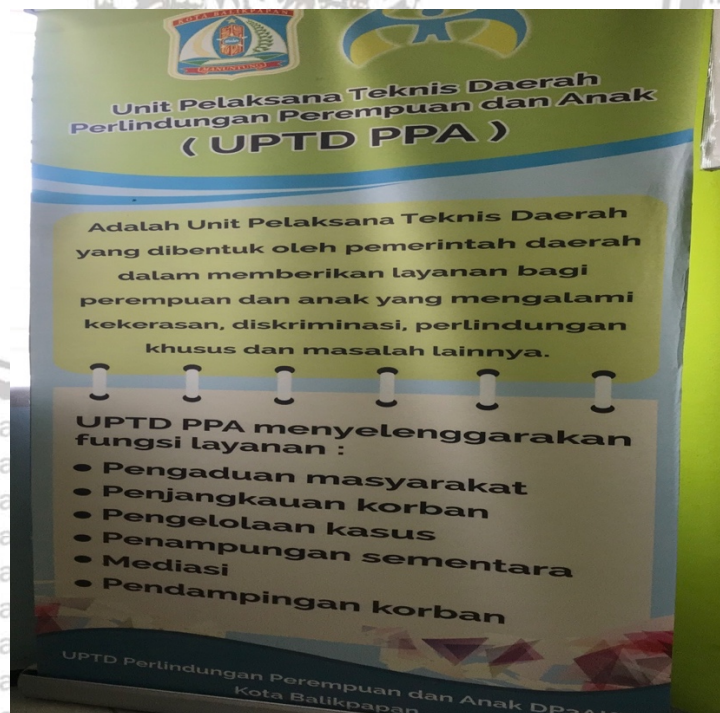
Tampak Depan UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



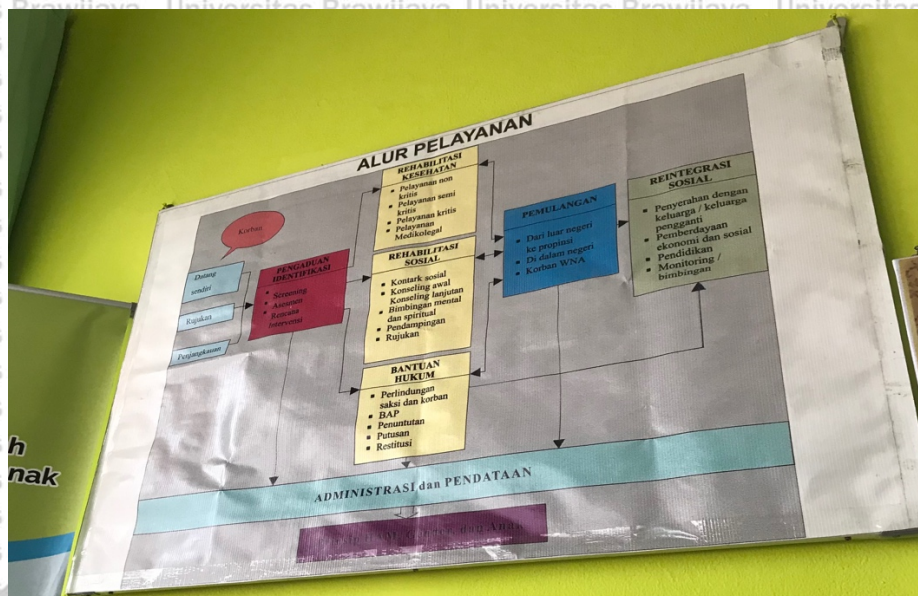
Struktur Organisasi di UPTD PPA

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



Spanduk Informasi Mengenai UPTD PPA

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



Spanduk Informasi Alur Pelayanan di UPTD PPA

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



Halaman Parkir UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021

DATA KASUS UPTD PPA DP3AKB KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019-2020

Status pertanggal 30 November 2020

Tahun 2019						Tahun 2020					Keterangan
Bulan	Jenis Kelamin	Jumlah Korban	Proses	Selesai	Presentase Penyelesaian (%)	Jenis Kelamin	Jumlah Korban	Proses	Selesai	Presentase Penyelesaian (%)	
Jan-Maret	PA	7		7	100	PA	13	3	10	76.9	Peningkatan 15,7 %
	LA	4		4	100	LA	3	0	3	100.0	
	PD	8		8	100	PD	6	2	4	66.7	
		19	0	19			22	5	17		
April-Juni	PA	4	1	3	75	PA	7	6	1	14.3	Penurunan 25 %
	LA	2		2	100	LA	1	1		0	
	PD	6		6	100	PD	1	0	1	100	
		12	1	11			9	7	2		
Juli-September	PA	13	2	11	84.6	PA	6	5	1	16.7	Penurunan 61,9 %
	LA	2		2	100	LA	1	1		0	
	PD	6	1	5	83.3	PD	1	1		0	
		21	3	18			8	7	1		
Oktober-Desember	PA	23	4	19	82.6	PA	3	3	0	0	
	LA	4		4	100	LA	1	1	0	0	
	PD	7		7	100	PD	1	1	0	0	
		34	4	30			5	5	0		
Jumlah Keseluruhan		86	8	78			44	24	20		

Data Kasus Kekerasan I

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

DATA KASUS UPTD PPA DP3AKB KOTA BALIKPAPAN DARI TAHUN 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Proses	Jumlah Kasus Selesai	Jumlah Klien	Jumlah Klien Proses	Jumlah Klien Selesai
1	2017	2	1	1	2	1	1
2	2018	19	5	14	17	5	12
3	2019	78	6	72	75	8	67
4	2020 (pertanggal 30 September 2020)	45	21	24	39	19	20
	Jumlah	144	33	111	133	33	100

No	Jenis Kasus	Tahun															
		2017				2018				2019				2020 (per tanggal 28 Sept 2020)			
		Proses	Selesai	Non KDRT	KDRT	Proses	Selesai	Non KDRT	KDRT	Proses	Selesai	Non KDRT	KDRT	Proses	Selesai	Non KDRT	KDRT
1	KF	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	22	0	3	2	3
2	KP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	2
3	KS	1	0	0	0	3	0	7	1	1	5	25	15	12	4	10	1
4	EE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6	PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PNL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DLL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0
		1	0	1	0	4	1	7	7	1	6	32	39	14	7	16	6

Data Kasus Kekerasan II

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

No	Tahun	Jenis Kelamin	Jumlah Korban	Penanganan Kasus		% Selesai
				Proses	Selesai	
1	Limpahan Tahun 2019	a. Perempuan Dewasa	5	1	4	80
		b. Perempuan Anak	26	7	19	73.08
		c. Laki-laki Anak	4	0	4	100
		Korban Perempuan (a+b)	31	8	23	74.19
		Korban Anak (b+c)	30	7	23	76.67
		Total Korban	35	8	27	77.14
2	Kasus Tahun 2020	a. Perempuan Dewasa	10	2	8	80.00
		b. Perempuan Anak	29	9	20	68.97
		c. Laki-laki Anak	6	2	4	66.67
		Korban Perempuan (a+b)	39	11	28	71.79
		Korban Anak (b+c)	35	11	24	68.57
		Total Korban	45	13	32	71.11
3	Total Kasus Ditangani Tahun 2020	a. Perempuan Dewasa	15	3	12	80.00
		b. Perempuan Anak	55	16	39	70.91
		c. Laki-laki Anak	10	2	8	80.00
		Korban Perempuan (a+b)	70	19	51	72.86
		Korban Anak (b+c)	65	18	47	72.31
		Total Korban	80	21	59	73.75

Tahun 2020

No	Jumlah Kasus	Non KDRT	KDRT	Penanganan Kasus	
				Proses	Selesai
1	Kekerasan Fisik	3	7	2	8
2	Kekerasan Psikis	7	2	3	6
3	Kekerasan Seksual	26	5	11	20
4	Eksplotasi Ekonomi	0	0	0	0
5	Eksplotasi Seksual	0	0	0	0
6	Perdagangan Orang	0	0	0	0
7	Penelantaran	0	0	0	2
8	Dan Lain-lain	2	0	0	0
	Jumlah	38	14	16	36

Tahun 2019

No	Jumlah Kasus	Non KDRT	KDRT	Penanganan Kasus	
				Proses	Selesai
1	Kekerasan Fisik	0	23	9	14
2	Kekerasan Psikis	0	2	0	2
3	Kekerasan Seksual	25	18	26	17
4	Eksplotasi Ekonomi	0	0	0	0
5	Eksplotasi Seksual	2	0	1	1
6	Perdagangan Orang	0	0	0	0

Data Kasus Kekerasan III

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan

Data Kasus Kekerasan

	Tahun 2019	Tahun 2020
PA	47	29
LA	12	6
PD	27	9
Jumlah	86	44

Usia	Tahun 2019	Tahun 2020
0-10 Tahun	17	15
10-18 Tahun	42	19
Dewasa	27	10
Jumlah	86	44

Jenis Kekerasan	Tahun 2019	Tahun 2020
Fisik	23	9
Psikis	2	8
Seksual	46	32
Eksplotasi	2	0
Penelantaran	0	0
Perdagangan Orang	0	0
Lainnya	5	2
Jumlah	78	51

DATA Kasus Non Kekerasan

Jenis Non Kekerasan	Tahun 2019	Tahun 2020
Pola Asuh	7	8
Perceraian	3	4
Hak Asuh	13	8
Mediasi	7	10
Bantuan Pindah Sekolah	1	0
Nafkah	1	3
Bulling	1	1
Jumlah	33	34


Data Kasus Kekerasan IV

Sumber: UPTD PPA Kota Balikpapan



Pengadilan Negeri Kota Balikpapan

Sumber: Data Primer Peneliti 2021



LBH SIKAP BALIKPAPAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BALIKPAPAN
Jl. ARS Muhammad No.07 Hotel Gran Senyur Kel. Klandasan Ulu - Kota Balikpapan
Kalimantan Timur - Indonesia , Email : lbhsikapborneo@gmail.com

SUBJECT _____

DATE _____

NAMA TERDAKWA SAKLON Bin TAHI

JAKSA PENUNTUT UMUM Bu Soraya, S.H

KELENGKAPAN BERKAS

	Cek	Tanggal
1. IDENTITAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. PENETAPAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. DAKWAAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. TUNTUTAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PUTUSAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Berkas Kasus Kekerasan LBH SIKAP

Sumber: Data Primer Peneliti 2021